



Dinas PPPAPKB
Kabupaten Temanggung



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

TAHUN 2025

**Dinas PPPAPKB
Kabupaten Temanggung**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung
Kode Pos 56218 Telepon/Faximili(0293) 491059

suratelektronik: dpppappkb@temanggungkab.go.id laman: dpppappkb.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun juga disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DPPPAPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Temanggung, 26 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung,



Dra. Gema Atis Wahyudi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197007301990012002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi..... iv

Daftar Tabel v

Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Gambaran Umum Dinas PPPAPPKB 1

 B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP 14

 C. Sistematika Penyajian LKJIP 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

 A. Visi Misi Organisasi 17

 B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 19

 C. Indikator Kinerja Utama 20

 D. Anggaran Tahun 2025 57

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 68

 A. Capaian Kinerja Organisasi 68

 B. Realisasi Anggaran..... 127

 C. Prestasi dan Penghargaan 131

BAB IV PENUTUP..... 132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Personil dan Tata laksana 10

Tabel 1.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja 11

Tabel 1.3. Permasalahan dan Isu Strategis 13

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Kelima) RPJMD Tahun 2025 – 2029 20

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB 20

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator
 kinerja sasaran pada indikator kinerja utama 24

Tabel 2.4. Cashcading DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 .. 27

Tabel 2.5. Rencana Anggaran DPPPAPPKB Tahun 2025 57

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 . 65

Tabel 3.1. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Organisasi 69

Tabel 3.2. Tujuan & Sasaran Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029 70

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 73

Tabel 3.4. Indek Ketimpangan Gender (IKG)..... 74

Tabel 3.5. Indek Pembangunan Keluarga (iBangga) 76

Tabel 3.6. Capaian indikator Kinerja sasaran I 77

Tabel 3.7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 79

Tabel 3.8. Capaian indikator sasaran 2 81

Tabel 3.9. Rasio pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak 82

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 84

Tabel 3.11. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung 85

Tabel 3.12. TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)..... 86

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 88

Tabel 3.14. Realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung
 Tahun 2021-2025 89

Tabel 3.15. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat 91

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Program Tahun 2025..... 93

Tabel 3.17. Persentase ARG pada belanja langsung APBD 94

Tabel 3.18. Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah 95

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Program 2..... 96

Tabel 3.20. Persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan yang dilaporkan
 dan tertangani..... 97

Tabel 3.21. Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 98

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Program 3..... 99

Tabel 3.23. Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas 100

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Program 4..... 101

Tabel 3.25. Kabupaten Layak Anak Kabupaten Temanggung 102

Tabel 3.26. Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) 103

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Program 5..... 104

Tabel 3.28. Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) 105

Tabel 3.29. Persentase Pernikahan Usia Anak 106

Tabel 3.30. Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani..... 107

Tabel 3.31. Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Anak 108

Tabel 3.32. Capaian Kinerja Program VI 109

Tabel 3.33. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan..... 110

Tabel 3.34. Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak
terpenuhi (Unmetneed) 111

Tabel 3.35. Median Usia Kawin Pertama..... 112

Tabel 3.36. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th) 113

Tabel 3.37. Capaian Kinerja Program 7..... 114

Tabel 3.38. Jumlah Peserta KB MKJP Kabupaten Temanggung..... 115

Tabel 3.39. Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung 116

Tabel 3.40. KB Pasca Persalinan 117

Tabel 3.41. Kampung KB Keluarga berkualitas dengan kategori mandiri 118

Tabel 3.42. Capaian Kinerja Program VIII 120

Tabel 3.43. Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Balita .. 121

Tabel 3.44. Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja..... 122

Tabel 3.45. Indeks Lansia Berdaya 123

Tabel 3.46. Capaian Indikator Kinerja Program 125

Tabel 3.47. Pencapaian Kinerja Program 125

Tabel 3.48. Tabel Indikator kinerja sasaran yang terdapat pada PK awal tahun..... 126

Tabel 3.49. Realisasi anggaran tahun 2025 127

Tabel 3.50. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024..... 131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung 9

Gambar 3.1. Indek Ketimpangan Gender (IKG) 74

Gambar 3.2. Indek Pembangunan Keluarga (iBangga) 76

Gambar 3.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 78

Gambar 3.4. Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 80

Gambar 3.5. Desk dan Review Dokumen Pengarusutamaan Gender (PUG)..... 81

Gambar 3.6. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja 83

Gambar 3.7. Sosialisasi Anti Perundungan "Tunjukkan Empati, Hentikan Intimidasi" . 84

Gambar 3.8. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 85

Gambar 3.9. TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) 86

Gambar 3.10. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 89

Gambar 3.11. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 91

Gambar 3.12. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 94

Gambar 3.13. Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah 95

Gambar 3.14. Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 98

Gambar 3.15. Persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas 100

Gambar 3.16. Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak 102

Gambar 3.17. Indeks Perlindungan Anak..... 105

Gambar 3.18. Persentase Pernikahan Usia Anak 106

Gambar 3.19. Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Anak 108

Gambar 3.20. Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)..... 111

Gambar 3.21. Median Usia Kawin Pertama 112

Gambar 3.22. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)..... 113

Gambar 3.23. Jumlah Peserta KB MKJP 115

Gambar 3.24. Jumlah Peserta KB Aktif..... 115

Gambar 3.25. KB Pasca Persalinan..... 116

Gambar 3.26. Kampung KB Keluarga berkualitas 117

Gambar 3.27. Bhakti Sosial Pelayanan KB khususnya KB MKJP IUD dan Implant... 119

Gambar 3.28. Pelayanan KB MKJP MOW 5 orang akseptor di RSUD 119

Gambar 3.29. Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan BKB 121

Gambar 3.30. Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja 122

Gambar 3.31. Indeks Lansia Berdaya 123

Gambar 3.32. Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe)..... 124

Gambar 3.33. Pengembangan Kelompok BKL Mandiri Menuju Lansia Berdaya (SIDAYA) dan Wisuda Sekolah Lansia 124

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB), yang pada Tahun 2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 110 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Perbub Nomor 20 tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPPPAPPKB sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, dan program urusan pengendalian penduduk keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut DPPPAPPKB Kabupaten

Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPAPPKB). Kabupaten Temanggung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Dan Perbup Nomor 20 tahun 2022 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPAPPKB).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPPAPPKB Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategis dan keterpaduan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- f. Pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi Kepala DPPAPPKB, Sekretaris, Kepala

Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas**

Kepala Dinas PPPAPPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

- **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;

- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam me

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris dibantu 2 sub bagian, yaitu:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Kuangan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan

keuangan; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; dan
- b. Sub Koordinator Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

- **Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan

keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator. Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
- b. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.

- **Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB**

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan pelayanan dan pembinaan KB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan ber-KB;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB sebagaimana, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Sub Koordinator, sesuai struktur organisasi yaitu:

- a. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- b. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

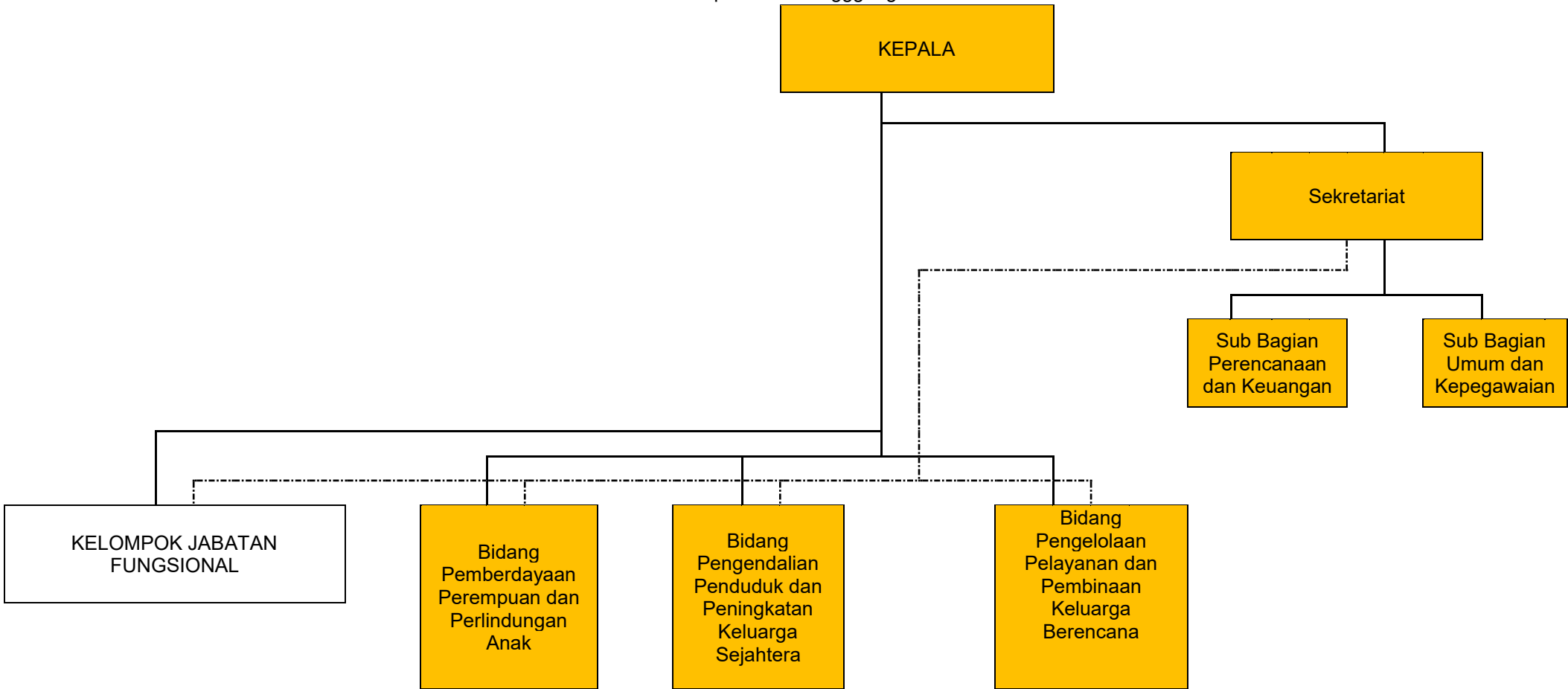
- **Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing;
- c. Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung



- **Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 1.1
Data Personil Dan Tata Laksana Dinas PPPAPPKB

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2								1					1		1		
KEPALA PERANGKAT DAERAH								1					1		1		
Eselon 3								4				1	3			2	
SEKRETARIS								1					1			1	
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								1				1					
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA								1					1			1	
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA								1									
Eselon IV							2					2					1
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN							1					1					1
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN							1					1					
JABATAN FUNGSIONAL						2	3				2	3					2
PELAKSANA			5			1	6	1			3	10					
PPPK dan PPPK Paruh waktu			5				7				5	7					
JUMLAH	0	0	10	0	0	3	18	6	0	0	10	23	4	0	1	2	2
TOTAL	37									37				5			

- **Asset/Modal**

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja DPPPAPPKB dapat dilihat pada table 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPPPAPPKB

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	3 Bidang	484.192.141	Eks BKKBN, Eks DINSOS, Gudang Arsip. Balai Penyuluh kab jumo, bejen dan Kranggan
2	Gedung	39 Gedung	8.710.135.102	Eks BKKBN, Eks DINSOS, Gudang Arsip, 20 Balai Penyuluhan, Selasar 1, Tempat Ibadah 1, Pagar Permanen 8.
3	Peralatan dan mesin	69Unit	8.716.588.152	Sepeda Motor 70, Mobil 8. Meubeler, komputer ,
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	8.218.100,	
5	Aset tetep lainnya		60.393.640	
6	Ektrakom Tabel		464.614.232,	
	Persediaan / pakai habis		963.785.385	

4. **Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.**

4.1 **Permasalahan DPPPAPPKB**

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan

tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPPPAPPKB antara lain:

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

1. Belum tersedianya data pilah gender sebagai dasar penyusunan anggaran responsif gender;
2. Masih kurangnya koordinasi Pokja Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan evaluasi dan review penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG);
3. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Belum terbentuknya Satgas Perlindungan Perempuan Anak (PPA);
5. Belum terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak; dan
6. Belum terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih tingginya laju pertumbuhan Penduduk;
2. Belum optimalnya pencapaian tingkat kesuburan Total (*Total Fertility Rate*);
3. Masih rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
4. Masih tingginya PUS di bawah umur 20 tahun;
5. Masih tingginya Median usia kawin pertama;
6. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA);
7. Masih tingginya keluarga beresiko Stunting;
8. Rasio jumlah Penyuluh KB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan, karena saat ini jumlah Penyuluh KB dengan jumlah desa yang ada, 1 PKB membina 8 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa.

4.2 Isue Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah

satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPPAPPKB. Kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Belum Tersedianya data pilah sebagai dasar penyusunan Anggaran Responsif Gender	Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal	Kesetaraan Gender	Rendahnya Sumber Daya Manusia	1) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 2) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat 3) Perubahan sosial budaya masyarakat	Belum optimalnya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam penyusunan anggaran responsif gender.
Besarnya jumlah kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usi muda yang besar, hal ini jika memiliki daya beli yang tinggi	Masih kurangnya koordinasi Pokja Pengarustamaan Gender dalam pelaksanaan evaluasi dan review penyusunan Anggaran Responsif Gender					
Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang dapat menjadi instrument mencegah kondlik dan memperkuat kerukunan dan persatuan	Belum Optimalnya Jejaring Lembaga Pengelola dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.					Masih lemahnya Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anakk
	Belum terbentuknya Satgas PPPA					
	Belum terbentuknya UPT PPPA					
	Masih tingginya laju pertumbuhan Penduduk					
	Belum optimalnya pencapaian tingkat kesuburan total (<i>Total Fertility Rate</i>)					
	Masih rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP					Masih rendahnya Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap KB pasca persalinan
	Masih tingginya PUS di bawah umur 20 tahun					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Masih tingginya Median usia kawin pertama					
	Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA).					Masih lemahnya Sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting .
	Rasio jumlah Penyuluh KB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa					

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 1.3 tersebut maka isu strategis DPPPAPPKB adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam penyusunan anggaran responsif gender. Masih lemahnya Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap KB pasca persalinan;
3. Masih Lemahnya Sinergitas lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.

B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP

I. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temangguung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahuun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama

Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

III. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

IV. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
Sistematika penyajian LKjIP DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi Misi organisasi
- B. Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan (cascading)
- C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan targetnya
- D. Anggaran Tahun 2025 per program

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi

a. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah:

**“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN,
MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”**

b. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang yang Stabil;
3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan;
5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Penjelasan Makna Misi:

a. Misi Pertama, Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan,

memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

- b. Misi Kedua,** Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.
- c. Misi Ketiga,** Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
- d. Misi Keempat,** Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

- e. **Misi Kelima**, Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 pada misi 3 (tiga) **Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan**, memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. maka tujuan yang hendak dicapai oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung adalah **“Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga”**

Tabel 2.1
 Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Kelima) RPJMD Tahun 2025 – 2029
 Untuk Tahun Ke - 1 (2025)

MISI 3 (Ketiga) :	
Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan	
TUJUAN	INDIKATOR
Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga	Indek Ketimpangan Gender
	Indek Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, maka DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/62 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DPPPAPPKB Temanggung Tahun 2025-2029.

Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
1	Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga	1. Indek Ketimpangan Gender	IKG = 1–(Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibagi Indeks Pembangunan Gender (IPG))	Indek Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran yang menunjukkan ketimpangan atau kesenjangan antara laki laki dan perempuan dalam mencapai pembangunan manusia di 3 (tiga) dimensi utama, yaitu : a. Kesehatan Reproduksi ,diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Remaja (AKTR) b. Pemberdayaan, diukur melalui persentase kursi parlemen yang diwakili perempuan dan proposi penduduk usia 25 tahun keatas dengan pendidikan menengah ketas menurut jenis kelamin .	BPS

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				c. Partisipasi Ekonomi, diukur menurut tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) antara laki laki dan perempuan	
		2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Indeks untuk mengukur pembangunan keluarga Indonesia yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) yang meliputi 3 Dimensi yaitu Ketenteraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan, yang perhitungan oleh BKKBN	iBangga dihitung melalui tiga dimensi utama, yaitu: 1. Ketenteraman (Ketahanan Psikologis dan Sosial Keluarga) → mencakup indikator keharmonisan, komunikasi, dan interaksi antara anggota keluarga 2. Kemandirian (Aspek Ekonomi dan Pendidikan Keluarga) → diukur melalui indikator pekerjaan, pendidikan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. 3. Kesejahteraan (Aspek Kesehatan dan Lingkungan Keluarga) → meliputi indikator kesehatan ibu dan anak, gizi, sanitasi, dan perilaku hidup bersih sehat. Setiap indikator dinilai dengan skoring, kemudian dilakukan standarisasi nilai menjadi skor 0–100. Nilai tiap dimensi dihitung menggunakan rata-rata geometrik, lalu digabung menjadi nilai komposit Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).	BKKKBN
B	Sasaran				
1	Meningkatnya kesetaraan Gender	Indek Pemberdayaan Gender	$IDG = 1/3 (IDP + IDPek + IDE)$ IDP (indeks partisipasi politik) IDPek (Indek partisipasi politik) IDE (indek Pembanguann Ekonomi)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.	BPS

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				Penghitungan IDG di Indonesia mengacu pada pedoman Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas, yang berlandaskan metode dari United Nations Development Programme (UNDP). IDG dihitung melalui tiga dimensi utama, yaitu: Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, diukur melalui persentase perempuan di DPRD. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, diukur melalui proporsi perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, dan manajer. Kemandirian ekonomi perempuan, diukur melalui rata-rata upah perempuan terhadap laki-laki serta tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin. Metode perhitungan dilakukan dengan menormalkan nilai masing-masing indikator menjadi indeks 0–100, kemudian dihitung rata-rata geometrik antar dimensi untuk memperoleh nilai IDG secara keseluruhan. Nilai IDG menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan — semakin tinggi nilai (mendekati 100), semakin tinggi pula tingkat partisipasi dan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.	
2	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dikalikan 100 %	Digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan kasus kekerasan oleh lembaga layanan atau perangkat daerah terkait. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang berhasil ditangani dengan jumlah kasus yang dilaporkan dalam satu periode pelaporan.	DPPPAPPKB

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
3	Mewujudkan keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu, perhitungan oleh BPS $R = (Pt - Po) / Po \times 1/t \times 100\%$ R: laju pertumbuhan penduduk Pt: penduduk tahun T Po : penduduk pada awal tahun t: selisih waktu(tahun)	Nilai LPP menggambarkan seberapa cepat atau lambat jumlah penduduk bertambah akibat , kelahiran , kematian dan migrasi. Data yang digunakan adalah hasil sensus penduduk atau data administrasi kependudukan (Dindukcapil) pada tahun awal dan tahun akhir periode	BPS
		Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	$TFR = 5 \times \sum ASFR$	Angka Fertilitas Total dihitung untuk menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun), apabila ia mengalami pola fertilitas tertentu pada suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat kesuburan atau kelahiran disuatu wilayah	BKKBN
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	Inspektorat
		IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM Bagian. Dengan rumus SKM = (total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus IKM = SKM x 25	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	Hasil survei masyarakat dan DPPAPPKB

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama

No	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kebijakan Responsif Gender	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pertumbuhan Penduduk yang Terkendali	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

No	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
				Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasipengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

No	Indikator Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

D. CASCADING PERANGKAT DAERAH

Setiap Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. DPPAPPKB Kabupaten Temanggung dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4
Cashcading DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN								SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA					
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025	2026
Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9,21	9,7	10	10,2	10,4																
						Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5																
												Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	46	46	46	46	46	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	46	46	46	46	46	

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	40	40	40	40	40	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen	40	40	40	40	40
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	100	100	100	100	100	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	20	20	20	20	20	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Orang	20	20	20	20	20

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
						Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5,39	5,15	4,9	4,66	4,41							Kabupaten/Kota								
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	69,23	73,08	84,61	92,3	96,15	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	20	20	20	20	20	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	20	20	20	20	20

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
											Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	25	25	25	25	25	Layanan penerima an pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten n/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerima an pengaduan Lingkup Kabupate n/Kota	Orang	25	25	25	25	25	
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi yang	1	2	3	4	5	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat	Lembaga	1	2	3	4	5

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
						Presentase terbentuknya DRPPA	2,47	30,1	43,94	57,79	71,63	Kewenangan Kabupaten/ Kota	mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)						layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)						
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,2	63,2	64,7	66	67,21	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30	30	35	35	35	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota	Orang	25	30	35	35	35
						Persentase pernikahan usia anak	0,105	0,092	0,084	0,075	0,067															
						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	100	100															
						Rasio kasus kekerasan terhadap anak	8,93	8,48	8,03	7,59	7,14															

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk																							
			TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)																							
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	58,7	58,8	58,9	59	59,1																
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,59	7,58	7,57	7,56	7,55																
					Median usia kawin pertama (MUKP)	19,9	20,1	20,2	20,30	20,40																

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
						Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	9,32	9,22	9,09	8,96	8,83															
												Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	12	12	12	12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	12	12	12	12	12
													Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	12	12	12	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	12	12	12	12

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	12	12	12	12	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	12	12	12	12	12	
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	46,7	46,95	47,2	47,45	47,7															

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATO R KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARA N PERAN GKAT DAERA H	INDIKA TOR SASAR AN	PROGRAM								KEGIATAN								SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATO R PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	SAT UAN	TARGET KINERJA					
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025	2026
						Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,7	77,8	78,25	78,45	79,75																
						Persentase KB pasca persalinan	57,4	59,9	62,9	64,9	68,1																
						Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	15,22	15,91	16,6	17,3	18																

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029				2025	2026	2027	2028	2029
												Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20	20	20	20	20	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	20	20	20	20	20

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATO R KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARA N PERAN GKAT DAERA H	INDIKA TOR SASAR AN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATO R PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	SAT UAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029		2025	2026
												Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		12	12	12	12	12	Pelaksan aan Mekanis me Operasio nal Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordina si Kecamat an (Rakorca m), Rapat Koordina si Desa (Rakorde s), dan Mini Lokakary a (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanis me Operasio nal Program Bangga Kencana (Pemban gunan Keluarga, Kependu dukan, dan Keluarga Berencan a) Melalui Rapat Koordinas i Kecamata n (Rakorca m), Rapat Koordinas i Desa (Rakorde s), dan Mini Lokakary a (Minilok)	Lapo ran	12	12	12	12	12

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN						SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12	12	12	12	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	12	12	12	12	12	

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		2025	2026	2027	2028	2029	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	2025	2026	2027	2028	2029
												Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1928	1928	1928	1928	1928	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1928	1928	1928	1928	1928

																	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan , Pelayanan dan Pengembang an Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/P enyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3	3	3	3	3	Fasilitasi Pelaksana aan Penyuluh an, Penggera kan, Pelayana n dan Pengemb angan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencan a/Penyul uh Lapanga n Keluarga Berencan a (PKB/PL KB)	Jumlah Laporan Hasil Penguata n Pelaksan aan Penyuluh an, Penggera kan, Pelayana n dan Pengemb angan Program Bangga Kencana (Pemban gunan Keluarga, Kependu dikan, dan Keluarga Berencan a) untuk Petugas Keluarga Berencan a/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencan a (PKB/PLK B)	Lapo ran	3	3	3	3	3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN						SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029				2025	2026	2027	2028	2029
												Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	63	63	63	63	63	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Laporan	63	63	63	63	63
												Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6215	6215	6215	6215	6215	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	6215	6215	6215	6215	6215

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	63	63	63	63	63	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	63	63	63	63	63	

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029				2025	2026	2027	2028	2029
												Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB	68	68	68	68	68	Fasilitasi Pengelolaaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	68	68	68	68	68

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	68	68	68	68	68	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	68	68	68	68	68	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	45,56	45,75	45,95	45,97	45,99															

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
						Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	87,30	87,4	87,5	87,6	87,7															
						Indeks lansia berdaya	57,9	58	58,1	58,2	58,3															
												Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80	80	80	90	100	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	70	80	80	90	100

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN									
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA						
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025	2026	2027
												Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3	3	3	3	3	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3	3	3	3	3	3	3	3	3

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		12	12	12	12	12	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	12	12	12	12	12

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10	10	10	10	10	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	10	10	10	10	10	

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	100	100	100	100	100	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	100	100	100	100	100

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATO R KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARA N PERAN GKAT DAERA H	INDIKA TOR SASAR AN	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATO R PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	SAT UAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					20 25	20 26	20 27				20 28	202 9			20 25
												Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	Pendamp ingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasu k remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kela hiran, Baduta/B alita) yang mendapat pendampi ngan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasu k remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kela hiran, Baduta/B alita) yang mendapat pendampi ngan	lapor an	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347	
		Meningk atnya Kualitas Tata Kelola Pemerint ahan dan Pelayana n Publik Perangk	Nilai AKIP Perang kat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaa n administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	100	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	7	7	Penyusu nan Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah	Doku men	7	7	7	7	7

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029				2025	2026	2027	2028	2029
		at Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	31	32	32	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	31	31	32	32	
											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	3	
												Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	
												Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	12	12	12	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	
												Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	
											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	12	
												Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
												Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	
												Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	2	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	2	2	2	

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATO R KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARA N PERAN KGAT DAERA H	INDIKA TOR SASAR AN	PROGRAM								KEGIATAN								SUB KEGIATAN							
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATO R PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	SAT UAN	TARGET KINERJA					
							2025	2026	2027	2028	2029					20 25	20 26	20 27				20 28	202 9			20 25	20 26
												Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76	76	76	76	76	Penyedia an Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapanga n	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya	Unit	76	76	76	76	76		
												Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	2	2	2	2	Pemeliha raan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi	Unit	2	2	2	2	2		

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATO R KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARA N PERAN GKAT DAERA H	INDIKA TOR SASAR AN	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATO R PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR SUB KEGIATA N	SAT UAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					20 25	20 26	20 27				20 28	202 9			
												Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	2	2	2	2	Pemeliha raan/Reh abilitasi Sarana dan Prasaran a Pendukun g Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi	Jumlah Sarana dan Prasaran a Pendukun g Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi	Unit	2	2	2	2	2	
Meningkat kan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																									
	Nilai AKIP																									

TUJUAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANG KAT DAERAH	SASARAN PERANG KAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN								
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA					URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA					URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027				2028	2029			2025
		Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Persentase keterseediaan layanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																							
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase keterseediaan capaian laporan kinerja																							
		Meningkatnya indeks manajemen risiko	Indeks Manajemen Risiko																							

Adapun diagram Cascading DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 terdapat dalam link:

<https://bit.ly/CashcadingRenstraDPPPAPPKB>

E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 sebesar Rp16.670.185.871,00 sementara berdasarkan APBD sebesar Rp16.654.647.242,00 atau berkurang sebesar Rp15.538.629,00. Adapun rincian belanja berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing bagian di DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 2.5
Rencana Anggaran DPPPAPPKB Tahun 2025

PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENJA	ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.245.900	4.230.485.522	4.226.239.622
Administrasi Keuangan	3.615.772.671	3.329.462.226	- 286.310.445
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.615.772.671	3.329.462.226	- 286.310.445
Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.000.000	39.275.000	- 22.725.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.400.000	- 600.000

PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENJA	ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000	6.815.000	- 4.185.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	4.200.000	- 2.800.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	11.860.000	- 140.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	15.000.000	- 15.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.788.800	787.767.696	- 35.021.104
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	4.862.000	- 2.138.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000	32.500.000	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	777.288.800	744.405.696	- 32.883.104
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.900.000	73.980.600	- 1.919.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	13.800.000	- 1.200.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000	35.180.600	- 719.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	-
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	10.000.000	25.100.800	15.100.800
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	7.738.000	- 2.262.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.000.000	7.738.000	- 2.262.000

PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENJA	ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	17.362.800	17.362.800
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	17.362.800	17.362.800
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	42.842.200	38.394.370	- 4.447.830
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200	38.394.370	- 4.447.830
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200	38.394.370	- 4.447.830
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.000.000	18.959.200	8.959.200
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	18.959.200	8.959.200
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	18.959.200	8.959.200
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	35.000.000	40.335.500	5.335.500
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	40.335.500	5.335.500
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	40.335.500	5.335.500
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	52.842.200	88.369.400	35.527.200
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	66.294.600	56.294.600

PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENJA	ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10.000.000	66.294.600	56.294.600
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.842.200	22.074.800	- 20.767.400
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.842.200	22.074.800	- 20.767.400
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	423.256.000	493.800.000	70.544.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	423.256.000	493.800.000	70.544.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	60.000.000	60.000.000
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000	217.800.000	-
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	205.456.000	216.000.000	10.544.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.293.884.000	7.470.149.000	176.265.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.790.619.000	1.919.320.000	128.701.000
Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	-	- 80.000.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.055.144.000	1.139.160.000	84.016.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.000.000	400.000.000	100.000.000
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	71.825.000	125.000.000	53.175.000

PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENJA	ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.650.000	5.160.000	- 78.490.000
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	250.000.000	50.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.221.481.000	2.874.672.000	653.191.000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	821.525.000	2.176.840.000	1.355.315.000
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.399.956.000	697.832.000	- 702.124.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.502.434.000	2.126.757.000	- 375.677.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000	33.300.000	3.300.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.075.434.000	2.063.307.000	- 12.127.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	362.000.000	-	- 362.000.000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.000.000	30.150.000	- 4.850.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	779.350.000	549.400.000	- 229.950.000
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.314.000	-	- 5.314.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	774.036.000	-	- 774.036.000

PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENJA	ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
Fasilitasipengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas	-	275.000.000	275.000.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	-	274.400.000	274.400.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.245.900.000	4.249.053.450	3.153.450
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.205.900.000	198.298.000	- 4.007.602.000
Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	-	13.500.000	13.500.000
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000	28.800.000	9.600.000
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.000.000	25.998.000	- 9.002.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000	130.000.000	- 170.000.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	3.836.700.000	-	- 3.836.700.000

PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENJA	ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	4.050.755.450	4.030.755.450
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.000.000	31.355.450	11.355.450
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1.827.000.000	1.827.000.000
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	2.192.400.000	2.192.400.000
TOTAL	16.670.185.871	16.654.647.242	

F. PERJANJIAN KINERJA DPPPAPPKB TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan Tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada diorganisasi.

Tabel 2.6
 Perjanjian Kinerja DPPPAPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA 2025	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2025	PROGRAM		
						URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA 2025
Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga	Indek Ketimpangan Gender	0,21	Meningkatnya kesetaraan Gender	Indek Pemberdayaan Gender	74,31	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9,21
							Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,3
			Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	100	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	100
							Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5,39
						Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender. pemenuhan hak. serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	69,23
							Kabupaten Layak Anak	madya

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA 2025	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2025	PROGRAM		
						URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA 2025
						Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Persentase terbentuknya DRPPA	2,47
						Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. eksploitasi. penelantaran. perkawinan. dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	62,2
							Persentase pernikahan usia anak	0,105
							Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	100
							Rasio kasus kekerasan terhadap anak	8,93
	Indek Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	63,98	Mewujudkan Keluarga Berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,79	Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	58,7
							Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed)	7,59
							Median usia kawin pertama (MUKP)	19,9
							Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	9,32
				Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	2,18	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	46,7

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA 2025	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2025	PROGRAM		
						URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA 2025
						masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	77,7
							Persentase KB pasca persalinan	57,4
							Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	15,22
						Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	45,56
							Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	87,3

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun ke 1 (satu) dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung pada misi ke 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi

Target

X 100%

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja =

Target – (Realisasi-Target)

Target

X 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Organisasi

No	Interval Nilai Realisasi	Interpretasi
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

1. Capaian Idikator Kinerja Utama

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.2.
Tujuan & Sasaran Renstra DPPPAPKB Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga		Indek Ketimpangan Gender	0,21	0,201	0,191	0,182	0,172	0,162
		Indek Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	63,98	64,79	65,6	66,41	66,63	68,07
	Meningkatnya kesetaraan Gender	Indek Pemberdayaan Gender	74,31	74,35	74,5	74,68	74,8	74,95
	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74
		Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,05	71,65	71,7	71,85	71,97	72
		IKM Perangkat Daerah	85,2	85,45	85,76	85,81	85,92	86
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Terpenuhinya kebutuhan penunjang perangkat daerah	Persentase kebutuhan umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan							
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9,21	9,7	10	10,2	10,4	10,5
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55
	Program Perlindungan Perempuan							
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5,39	5,15	4,9	4,66	4,41	4,17
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga							
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender. pemenuhan hak. serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	69,23	73,08	84,61	92,3	96,15	100
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)							
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Kabupaten Layak Anak	madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
		Persentase terbentuknya DRPPA	2,47	30,1	43,94	57,79	71,63	85,47
	Program Pemenuhan Khusus Anak							
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. eksploitasi. penelantaran. perkawinan. dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	62,2	63,2	64,7	66	67,21	68,19
		Persentase pernikahan usia anak	0,105	0,092	0,084	0,075	0,067	0,059
		Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	100	100	100	100	100	100
		Rasio kasus kekerasan terhadap anak	8,93	8,48	8,03	7,59	7,14	6,69
	Program Pengendalian Penduduk							
	Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	58,7	58,8	58,9	59	59,1	59,2
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed)	7,59	7,58	7,57	7,56	7,55	7,54

Tujuan	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Median usia kawin pertama (MUKP)	19,9	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	9,32	9,22	9,09	8,96	8,83	8,7
	Program Pembinaan Keluarga Bertencana							
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	46,7	46,95	47,2	47,45	47,7	47,95
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	7,77	77,8	78,25	78,45	79,75	80
		Persentase KB pasca persalinan	57,4	59,9	62,9	64,9	68,1	70
		Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	15,22	15,91	16,6	17,3	18	18,68
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	45,56	45,75	45,95	45,97	45,99	46,03
		Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	87,3	87,4	87,5	87,6	87,7	87,8
		Indeks lansia berdaya	57,9	58	58,1	58,2	58,3	58,4

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

TUJUAN :									
Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Tahun 2024 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
						(%)			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indek Ketimpangan Gender	angka	0,22	0,210	0,22	95,45	0,162	0,22	73,64
2	Indek Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	angka	63,17	63,98	73	100,000	68,07	73	100,00
Capaian Kinerja Tujuan						97,73			86,82

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator Tujuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sebesar 97,73% dengan kategori skala kinerja **“Sangat Tinggi”**. Sedangkan capaian kinerja tujuan jika dibandingkan kan dengan target akhir renstra memperoleh capaian sebesar 82,82 % atau kategori **“ Tinggi”**. Capaian Kinerja Tujuan DPPAPPKB pada tahun 2025 ditentukan oleh 2 indikator yang meliputi :

- a) Indek Ketimpangan Gender (IKG);
- b) Indek Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga).

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

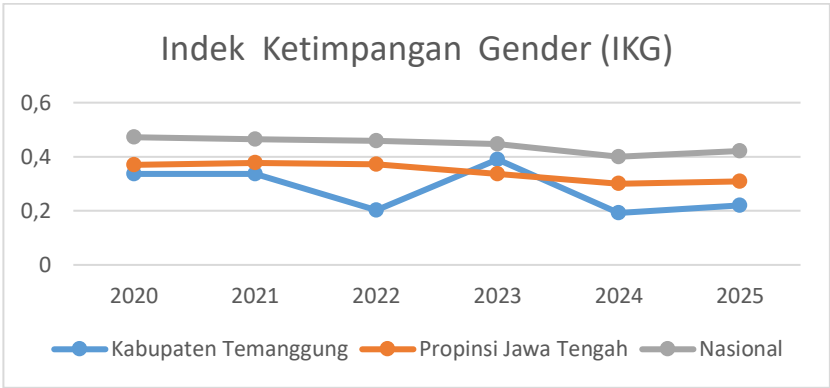
1) Indek Ketimpangan Gender (IKG)

Indek Ketimpangan Gender (IKG) mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki laki dalam 3 demensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja (*Publikasi “Pembangunan Manusia Berbasis Gender” Tahun 2023 oleh Kementrian PPPA*).

Indek Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran yang menunjukkan ketimpangan atau kesenjangan antara laki laki dan perempuan dalam mencapai pembangunan manusia di 3 (tiga) demensi utama yaitu:

- a. Kesehatan Reproduksi diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Remaja (AKTR);
- b. Pemberdayaan diukur melalui persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan;
- c. Partisipasi Ekonomi, diukur menurut tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) antara laki laki dan perempuan.

IKG Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut ini:



Gambar 3.1 Indek Ketimpangan Gender (IKG)

Tabel 3.4
Indek Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2025

NO	Indek Ketimpangan Gender (IKG)	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Temanggung	0,336	0,336	0,202	0,390	0,192	0,220
2.	Provinsi Jawa Tengah	0,370	0,377	0,371	0,336	0,3	0,308
3.	Nasional	0,472	0,465	0,459	0,447	0,4	0,421

Sumber data: BPS Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.4, capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Temanggung selama periode Tahun 2020–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif (naik dan turun). Capaian terbaik terjadi pada Tahun 2024 dengan nilai sebesar 0,192. Namun pada Tahun 2025, angka IKG turun menjadi 0,220 atau turun sebesar 0,028 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi turun tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan gender kembali meningkat dibandingkan Tahun 2024. Meskipun demikian, jika dibandingkan tingkat Nasional dengan capaian Tahun 2025 sebesar 0,421 dan tingkat Provinsi sebesar 0,308, capaian Kabupaten Temanggung sebesar 0,220 masih lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan gender di Kabupaten Temanggung relatif lebih rendah dibandingkan

rata-rata nasional maupun Provinsi . Capaian Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Faktor Pendorong:

- a) akses pendidikan yang merata;
- b) Peningkatan parstisipasi kerja perempuan;
- c) Peran aktif perempuan pada organisasi masyarakat.

2) Faktor Penghambat:

- a) Norma budaya dan stereo gender tradisional;
- b) Masih tingginya kekerasan berbasis gender.

3) Rencana tindak lanjut:

- a) Memperkuat peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- b) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.

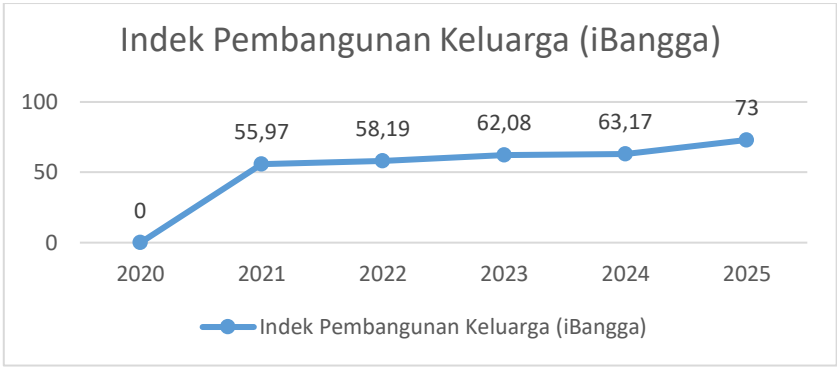
2) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indek Pembangunan Keluarga adalah pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)I adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga. (Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan).

Indek Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 Variabel, 3 dimensi yang ditentukan mencakup:

- 1. Dimensi Ketentraman;
- 2. Dimensi Kemandirian; dan
- 3. Demensi Kebahagiaan.

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung selama periode Tahun 2020–2025 sebagaimana disajikan pada grafik dan tabel berikut:



Gambar 3.2 Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)

Tabel 3.5
Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)	N.A	55,97	58,19	62,08	63,17	73

Berdasarkan Berdasarkan Tabel 3.5, capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 sebesar 73. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,83 poin dibandingkan Tahun 2024 yang tercatat sebesar 63,17. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung. Apabila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional sebesar 67,3 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,5, maka capaian Kabupaten Temanggung berada di atas rata-rata nasional maupun Provinsi . Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung relatif lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tingkat yang lebih tinggi. Nilai iBangga tersebut dihitung berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi Ketenteraman, dengan nilai 79,9;
2. Dimensi Kemandirian, dengan nilai 74,6; dan
3. Dimensi Kebahagiaan, dengan nilai 64,6.

Dari capaian tersebut, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat, sebagai berikut:

1) Faktor Pendorong

Meningkatnya kondisi ekonomi, sosial, dan tingkat pendidikan dalam keluarga yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas

- pembangunan keluarga.
- 2) Faktor Penghambat
- Masih lemahnya pemahaman keluarga terhadap indikator-indikator peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 3) Rencana tindak Lanjut
- Meningkatkan pemahaman terkait mekanisme dan indikator perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), mengingat proses perhitungan indeks tersebut bukan merupakan kewenangan langsung Perangkat Daerah.

b. **Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dan sasaran program**

1) **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kesetaraan Gender.**

Pengukuran capaian kinerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis 1 Meningkatnya Kesetaraan Gender dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan Realisasi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 1 sebesar 99,96 % dengan kategori **“sangat tinggi”** dan sebesar 99,11 dari target akhir Renstra dengan kategori **“Sangat tinggi”** sebagaimana dan tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Capaian indikator Kinerja sasaran I

SASARAN :									
Meningkatnya kesetaraan Gender									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indek Pemberdayaan Gender	angka	74,28	74,31	74,28	99,96	74,95	74,28	99,11
Capaian Kinerja sasaran 1							99,96		99,11

Sumber data: BPS Kabupaten Temanggung

Sasaran Startegis Meningkatnya Kesetaraan Gender , diukur dengan indikator sebagai berikut

a) **Indek Pemberdayaan Gender**

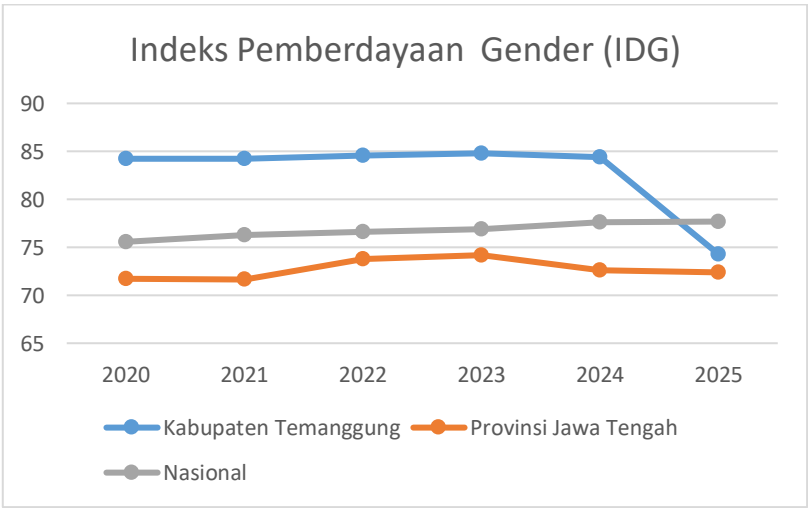
Sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender ditetapkan sebagai upaya untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Kesetaraan gender merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang menggambarkan peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan (*Publikasi “Pembangunan Manusia Berbasis Gender” Tahun 2023 oleh Kementrian PPPA*). IDG dihitung melalui tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, diukur melalui persentase perempuan di DPRD;
- b. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, diukur melalui proporsi perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, dan manajer;
- c. Kemandirian ekonomi perempuan, diukur melalui rata-rata upah perempuan terhadap laki-laki serta tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin.

Metode perhitungan dilakukan dengan menormalkan nilai masing-masing indikator menjadi indeks 0–100, kemudian dihitung rata-rata geometrik antar dimensi untuk memperoleh nilai IDG secara keseluruhan. Nilai IDG menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan semakin tinggi nilai (mendekati 100), semakin tinggi pula tingkat partisipasi dan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. IDG (Indek Pemberdayaan Gender) Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut ini:



Gambar 3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tabel 3.7
 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 Kabupaten Temanggung Tahun 2021 s/d 2025 T

NO	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Temanggung	84,21	84,21	84,56	84,8	84,38	74,28
2.	Provinsi Jawa Tengah	71,73	71,64	73,78	74,18	72,58	72,38
3.	Nasional	75,57	76,26	76,59	76,9	77,62	77,68

Sumber data: BPS tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Temanggung pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan. Namun demikian, pada Tahun 2024 terjadi penurunan, dan hingga Tahun 2025 capaian tersebut kembali mengalami penurunan.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah, capaian IDG Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi, di mana nilai IDG Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 72,38. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan capaian tingkat nasional sebesar 77,68, nilai IDG Kabupaten Temanggung masih berada di bawah rata-rata nasional. Capaian IDG di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor

- a) Faktor pendorong:
 - a. Komitmen pemerintah dalam keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan, perempuan selaku manajerial;
 - b. Akses pelatihan kerja bagi perempuan (pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK).
- b) Faktor Penghambat:
 - a. Turunnya partisipasi perempuan di DPRD yang saat ini hanya 20%, turun 10% dibandingkan periode tahun sebelumnya;
 - b. Kesenjangan upah perempuan dibandingkan laki laki lebih rendah;
 - c. Stereotip gender dan budaya patriaki masih kuat.
- c) Rencana tindak lanjut:
 - a. Memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan (musrenbang);

- b. Pelatihan UMKM bagi perempuan bekerja sama dengan organisasi perempuan.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesetaraan Gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2025, didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp25.100.800,00, dengan realisasi sebesar Rp23.180.350,00 atau 92,35%. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.920.450,00 atau 7,65% dari pagu yang ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan capaian kinerja sebesar 95,11%, maka terjadi efisiensi sumber daya sebesar 2,76%, yang diperoleh dari selisih antara persentase capaian kinerja dan persentase realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis tersebut dapat dicapai secara efektif dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien. Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3.4
Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
bagi OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Temanggung
Kamis, 28 Agustus 2025



Gambar 3.5
Desk dan Review Dokumen Pengarusutamaan Gender (PUG)
Senin, 6 Oktober 2025

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Pengukuran capaian kinerja DPPPAPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis 2 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan Realisasi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 2 sebesar 100% dari target atau kategori “**Sangat tinggi**” dan 100% dengan kategori “**Sangat tinggi**” dari target akhir renstra Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Capaian indikator sasaran 2

SASARAN II :									
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja sasaran II							100		

Sumber: IKPD DPPPAPKB Tahun 2025
Sasaran Startegis Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, diukur dengan indikator sebagai berikut :

a) Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak

Sasaran strategis meningkatkan perlindungan perempuan dan anak ditetapkan sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak atas rasa aman, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta akses terhadap layanan penanganan yang cepat, terpadu, Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui Rasio Pelayanan Kekerasan pada Perempuan dan Anak, yang menggambarkan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memperoleh layanan penanganan sesuai standar operasional.

Rasio Pelayanan Kekerasan pada Perempuan dan Anak digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan kasus kekerasan oleh lembaga layanan atau perangkat daerah terkait. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang berhasil ditangani dengan jumlah kasus yang dilaporkan dalam satu periode pelaporan, sesuai standar pelayanan. (Peraturan Menteri PPPA tentang Standar dan Jenis Layanan bagi Korban Kekerasan).

Capaian Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun:

Tabel 3.9
Rasio pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s/d 2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	42	11	22	13	9	26
2.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor	42	11	22	13	9	26
3.	Rasio pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100	100	100	100	100	100

Sumber DPPAPPKB Tahun 2025

Capaian kasus yang ada di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor pendorong:

Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

2. Faktor Penghambat:

Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak dengan indikator Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp38.394.370,00 dengan realisasi Rp20.235.350,00 (52,70%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp18.154.020,00 atau (47,30%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi 47,30% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 52,70%) Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan:

a. Program Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan:

- Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan
- Pendampingan dan penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan



Gambar 3.6

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja
Jumat, 28 November 2025

b. Program Perlindungan khusus anak dengan kegiatan:

- Seminar anti bullying;
- Pendampingan dan penjangkauan kasus kekerasan terhadap anak;
- Pencegahan kekerasan terhadap anak oleh kader PPPA;
- Pendampingan dan penjangkauan kasus kekerasan thd anak;
- Pencegahan kekerasan terhadap anak oleh kader PPA (honor kader PPA).



Gambar 3.7
Sosialisasi Anti Perundungan "Tunjukkan Empati, Hentikan Intimidasi"
Kepada Siswa-Siswi Agen Perubahan IV SMA Negeri 2 Temanggung
Rabu, 20 Agustus 2025

3) Sasaran 3: Mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Pengukuran capaian kinerja DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis Mewujudkan keluarga kecil berkualitas dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 3 sebesar 100% dari target atau kategori “**Sangat tinggi**” dan 98,05 % atau kategori “**Sangat tinggi**” berdasarkan target akhir renstra Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

SASARAN :									
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
						(%)			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,8	0,79	0,77	100	0,74	0,77	96,10
2	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun		2,19	2,18	1,24	100	2,13	1,24	100,00
Capaian Kinerja sasaran 1						100,00			98,05

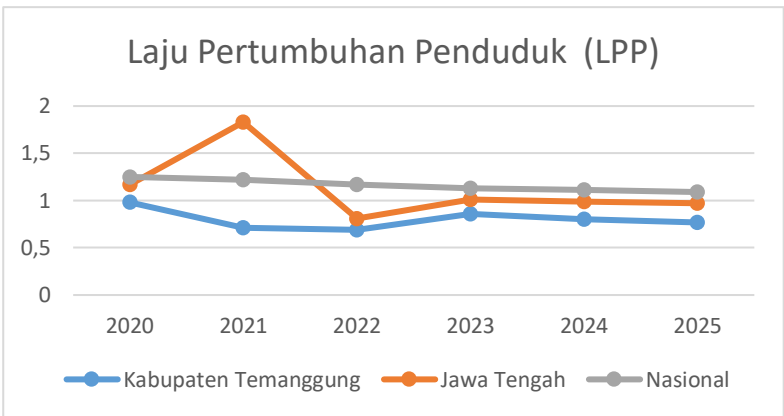
Sumber: IKPD DPPAPPKB Tahun 2025

Sasaran strategis mewujudkan keluarga kecil berkualitas ditetapkan sebagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus

meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Keluarga kecil berkualitas diharapkan mampu menciptakan kondisi keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui

a) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

LPP mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk di suatu wilayah menurut UU No 52 Tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 sebesar 0,77% seperti grafik dan tabel dibawah ini:



Gambar 3.8 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Tabel 3.11
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d 2025

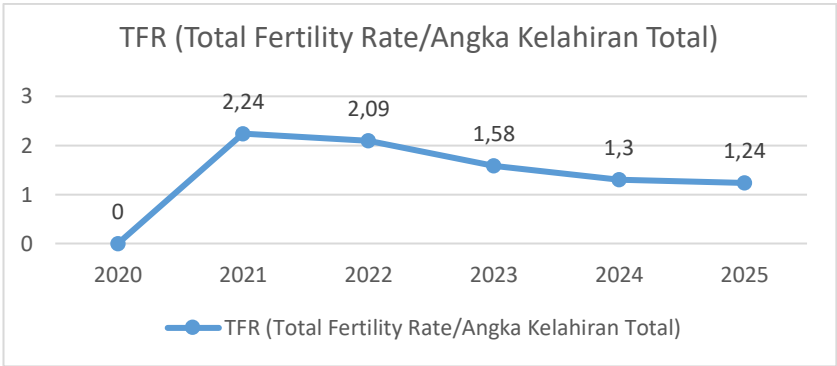
No	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	LPP Kab. Temanggung	0,98	0,71	0,69	0,86	0,8	0,77
2	LPP Provinsi Jateng	1,17	1,83	0,81	1,01	0,99	0,97
3	LPP Tingkat Nasional	1,25	1,22	1,17	1,13	1,11	1,09

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa capaian Laju Pertumbuhan penduduk kabupaten Temanggung lebih kecil dibandingkan capaian tingkat Provinsi maupun tingkat nasional. Capaian LPP Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor Pendorong adalah: Meningkatnya KIE kepada masyarakat tentang Pengendalian penduduk.
2. Faktor Penghambat adalah: Masih tingginya angka kelahiran (CBR).
3. Capaian LPP kabupaten temanggung sebesar 0,77 (100%) dari target yang sebesar 0,79 , dengan kategori “*sangat tinggi*”

b) TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)

TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total), yaitu banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15–49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15–49 tahun pada periode yang sama. Capaian TFR di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun ini semakin menurun atau semakin membaik. Dari capaian tahun 2025 tercapai 1,24, artinya seorang wanita usia antara 1–49 tahun, rata rata anak yang dilahirkan antara 1-2 anak. Capaian TFR kabupaten Temanggung pada Tahun 2020–2025 sebagaimana gambar dan tabel berikut:



Gambar 3.9 TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)

Tabel 3.12
TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)	n.a.	2,24	2,09	1,58	1,3	1,24

Perhitungan TFR dikabupaten Temanggung berdasarkan laporan jumlah rata rata anak yang dilahirkan perkelompok umur tidak berdasarkan perhitungan dari BKKBN. Capaian TFR ini pada tahun 2025 jika dibandingkan capaian tingkat Provinsi sebesar 2,03 dan Nasional 2,11. Capaian Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan capaian Provinsi maupun tingkat Nasional dengan kategori “*sangat tinggi*” dari target yang telah ditentukan sebesar 2,18%. Capaian TFR Kabupaten Temanggung ada beberapa Faktor yang mempengaruhi yaitu:

- 1. Faktor sosial budaya
 - a. Penundaan usia perkawinan;
 - b. Perubahan nilai budaya dari nilai tradisional menuju individualistik;
 - c. Gaya hidup urban, banyak anak banyak beban hidup di kota.
- 2. Faktor Ekonomi
 - a. Tingginya biaya hidup, dengan tinggi biaya pendidikan, perumahan

dan kesehatan, dan orang cenderung mempunyai anak sedikit;

- b. Perempuan pekerja, Perempuan yang aktif secara ekonomi cenderung menunda atau membatasi jumlah anak.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dan TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp12.213.002.450,00 dengan realisasi Rp10.149.039.637,00, sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp2.063.962.813,00 atau (83,1%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi 16,9% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 83,1%) Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan:

1. Program Pengendalian Penduduk, kegiatan yang dilaksanakan:
 - a. Pencatatan dan pelaporan pembinaan dan pelayanan KB;
 - b. Pendataan Keluarga Beresiko Stunting;
 - c. Register dan regetrasi pelayanan KB pada Fasilitas Kesehatan.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana ,kegiatan yang dilaksanakan:
 - a. Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB;
 - b. Promosi dan Kie program Bangga Kencana;
 - c. Advokasi dan koordinasi dengan mitra kerja terkait penanganan percepatan Stunting;
 - d. Rapat koordinasi bangga kencana dan Tim Penanganan Penurunan Stunting;
 - e. Distribusi Alat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan;
 - f. Pelayanan KB MKJP (Metode kontraspasi Jangka Panjang) pada moment strategis;
 - g. Pembinaan Kampung KB
3. Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, kegiatan yang dilaksanakan:
 - a. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - b. Pemantauan dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) oleh Tim Pendamping Keluarga.

4) Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan Realisasi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 4 sebesar 100% dari target Renstra atau kategori “**Sangat tinggi**” dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tercapai 99,34 % atau kategori “**sangat tinggi**” , sebagaimana tabel dibawah ini:

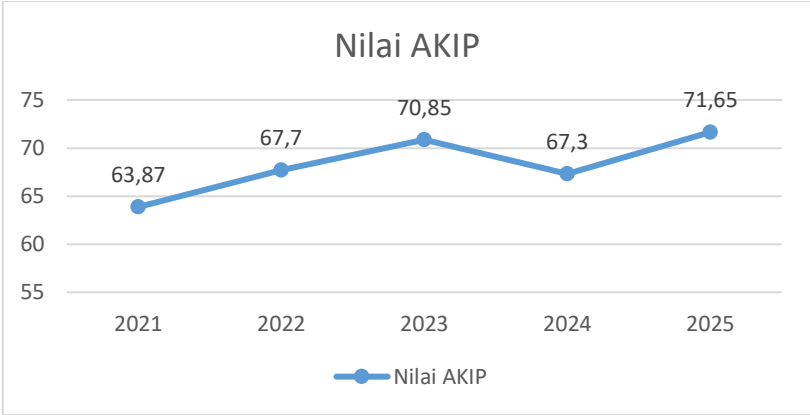
Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

SASARAN 4:									
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah		67,3	70,05	71,65	100	72	71,65	99,51
2	Nilai IKM Perangkat Daerah		85,18	85,2	85,29	100	86	85,29	99,17
Capaian Kinerja sasaran 4						100			99,34

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, nilai AKIP Perangkat Daerah digunakan untuk menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal setiap setahun sekali.

Nilai AKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada n-1. Realisasi Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 3.10 Nilai AKIP

Tabel 3.14
Realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No	Komponen yang dinilai	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	21,87	20,87	20,10	19,8	20,40
2	Pengukuran Kinerja	19,43	22,50	19,50	19,8	22,80
3	Pelaporan Kinerja	11,71	12,00	11,25	10,2	10,95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	11,50	12,50	20,00	17,50	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		63,87	67,70	70,85	67,3	71,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	BB	B	BB

Sumber: DPPAPPKB data diolah, 2025

Berdasarkan table diatas capaian AKIP DPPAPPKB mengalami fluktuasi dari tahun 2021 s.d 2025. Dari tabel diatas capaian AKIP DPPAPPKB pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pada Tahun 2023.Pada tahun 2025 dari target 70,05 tercapai 71,65 (99,49%) tetapi lebih besar jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yaitu 67,3, dan juga lebih besar dari nilai AKIP kabupaten yang sebesar 67,37. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

- a) Faktor pendorong :
- 1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);
 - 2. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - 3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward

dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;

- 4. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
 - 5. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - 6. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.
- b) Faktor Penghambat dan Permasalahan: terdapat evaluasi dari inspektorat yang perlu ditindaklanjuti terkait narasi yang belum lengkap pada dokumen tindak lanjut monitoring kinerja triwulanan, dokumen rencana aksi, dan masih terdapat indikator perangkat daerah yang belum mencapai target.
- c) Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah: Menyesuaikan rencana aksi secara berkala atas rekomendasi dan evaluasi per triwulan, melakukan penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja dokumen rencana aksi, menyusun laporan monitoring dan evaluasi per triwulan rekomendasi per aktivitas

b. Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara berkala minimal satu kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 14/2027.

Rumus:

SKM =

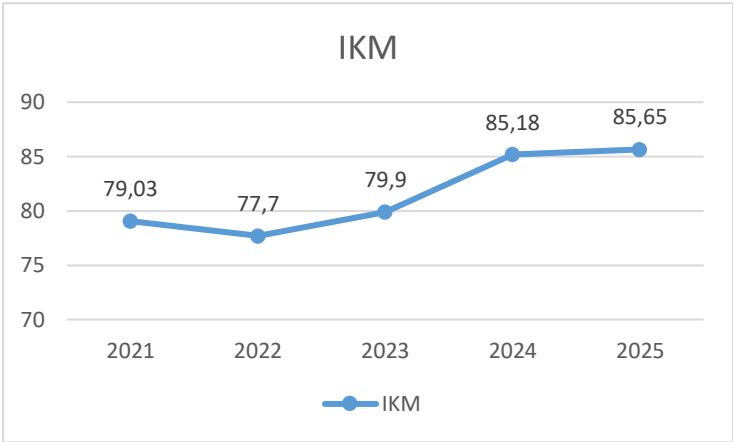
Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

Total Unsur yang Terisi

x Nilai Penimbang

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di

Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 3.11 indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.15
Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persyaratan	3,14	3,1	3,13	3,32	3,37
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,16	3,11	3,12	3,29	3,33
3	Waktu pelayanan	3,07	3,02	3,12	3,19	3,2
4	Biaya / tariff	3,64	4	4	4	4
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,17	3	3,15	3,22	3,27
6	Kompetensi pelaksana	3,2	3	3,15	3,27	3,27
7	Perilaku pelaksana	3,23	3	3,22	3,34	3,37
8	Sarana dan Prasarana	3,15	3	3,1	3,25	3,24
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2,72	2,78	2,81	3,81	3,8
IKM Unit Layanan		79,03	77,7	79,9	85,18	85,65
Mutu Unit Layanan		B	B	B	B	B

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung data diolah Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas IKM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Tahun 2021-2025 semakin meningkat. Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor B/167/041.7/01/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 terdapat perubahan template laporan SKM diantaranya adanya konversi nilai hasil perhitungan sub unsur IKM dari skala 1-4 menjadi 1-100. Pada Tahun 2025 target IKM pada Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung sebesar 85,2% telah tercapai 85,65% (100%) meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 85,18%. Namun Realisasi pada Tahun 2025 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan hasil IKM Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan rata-rata 87,66% dan juga masih lebih rendah dibandingkan Hasil IKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dimana realisasi Semester I sebesar 88% dan realisasi Semester II sebesar 89% sehingga jika dirata-rata menjadi sebesar 88,5%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

- a) Faktor Pendorong: Telah terbentuk tim pelaksana survei kepuasan masyarakat, pelaksanaan survei telah mempedomani Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b) Faktor Penghambat dan Permasalahan: Tidak semua pengguna layanan mengisi Kuesioner SKM, produk layanan yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, mekanisme pengaduan dinilai belum responsif dan kurang efektif dalam menindaklanjuti masukan masyarakat, ketersediaan dan kondisi sarana prasarana, seperti fasilitas penunjang serta aksesibilitas layanan masih kurang.
- c) Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah: Evaluasi dan Penyempurnaan Produk Layanan, Peningkatan sistem penanganan pengaduan, saran dan masukan, melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan fasilitas pelayanan publik.

c. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator sasaran strategis, maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terhadap capaian indikator program sebagai bentuk keterkaitan antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan program. Adapun capaian indikator program itu adalah:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. **Program 1 : Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan**

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

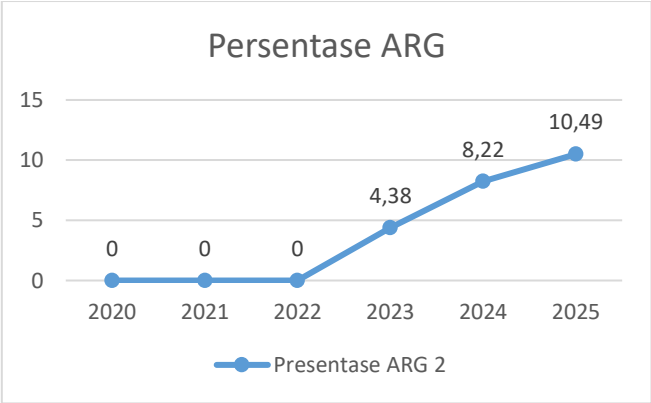
PROGRAM 1 :									
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,22	9,21	10,49	100	10,5	10,49	99,9
2	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,27	2,27	3,02	100	2,55	3,02	100
Capaian Kinerja program				100			100		

Sumber data IKPD DPPPAPPKB Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2025 sudah tercapai 100% kategori “*sangat tinggi*” dengan indikator sebagai berikut:

1) **Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD.**

Persentase ARG pada belanja langsung adalah proposi anggaran yang mengintegrasikan analisis gender (ARG) dalam program dan kegiatan terhadap total belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada waktu tahun tertentu. Untuk memperoleh angka Persentase ARG pada belanja langsung APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari persentase jumlah anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja langsung APBD secara keseluruhan dikalikan 100. Capaian persentase ARG pada belanja langsung APBD di Kabupaten Temanggung pada 5 tahun terakhir sebagai berikut:



Gambar 3.12 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

Tabel 3.17
Persentase ARG pada belanja langsung APBD
Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 SD 2025

No	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD	N.A	N.A	N.A	232.540.315.305	29.496.530.560	72.288.109.024
2	Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	N.A	N.A	N.A	5.312.431.154.870	358.678.943.856	687.901.880.607
	Persentase				4,38	8,22	10,49

Sumber data: DPPAPPKB Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Persentase ARG pada belanja operasional dan modal APBD pada tahun 2025 TW IV tercapai 10,49, kalau dibandingkan pada tahun sebelumnya ada peningkatan sebesar 2,27%. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor Pendorongnya adalah:
- Telah dilaksankanya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Resposif Gender dalam proses perencanaan;

Telah disyaratkan sebagai dokumen yang harus direview oleh Inspektorat dalam Pnyusunan RKA.
2. Faktor Penghambatnya adalah:
- Perencana dan pengelola anggaran belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep gender dan bagaimana menerapkan dalam anggaran

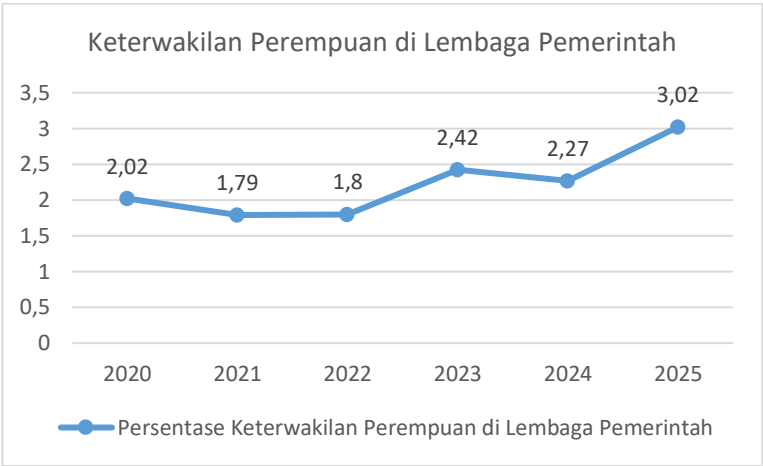
2) Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan yang dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah. Sedangkan definisi dari

keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah.

Rumus: jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100%.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2025 sampai Triwulan IV sebanyak 3,02% dapat dilihat pada gambar dan tabel 3.18 dibawah ini:



Gambar 3.13
Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tabel 3.18
Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan IV

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	3.536	3.349	3.349	5.313	5.216	6.665
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	174.643	187.543	185.816	219.154	230.123	220.509
3	Persentase	2,02	1,79	1,8	2,42	2,27	3,02

Sumber : DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Temanggung diperoleh data dari:

- 1. Jumlah ASN yang ada di data BKPSDM: 5661
- 2. Jumlah perempuan yang bekerja di BLUD: 391
- 3. Jumlah perempuan yang bekerja sebagai perangkat desa, data dari DIPERMADES: 613
- 4. Jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan sebanyak 9 orang

Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupten

Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor Pendorongnya adalah
- Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada perempuan memperluas peluang untuk bekerja dilembaga pemerintah.
2. Faktor Penghambat adalah:
- Budaya Patriaki yang menganggap laki laki lebih layak memimpin
- Untuk mencapai target Kinerja program Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp25.100.800,00 dengan realisasi Rp10.149.039.637,00 sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp23.180.350,00 atau (92,35%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi 7,65% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 92,35%) Kinerja sasaran Program ini didukung dalam kegiatan:
1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program 2 : Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Program 2

PROGRAM 2 :									
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
						(%)			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	5,6	5,39	5,62	95,91	4,17	5,62	74,2
Capaian Kinerja program						95,91			87,1

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program menurunnya kekerasan terhadap perempuan Kabupaten Temanggung,

secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 95,91% dengan kategori “**sangat tinggi**” sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka di tahun 2025 sudah tercapai 87,10% kategori “**Tinggi**” dengan indikator sebagai berikut:

1) **Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani.**

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani dikabupaten Temanggung dari tahun 2021–2025 sebagai berikut :

Tabel 3.20
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan
yang terlapor dan tertangani
Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 – 2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	18	6	8	6	7	22
2.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor	18	6	8	6	7	22
3.	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlapor dan tertangani	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa semua kasus yang melapor 100% tertangani sesuai dengan SOP yang ada. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi indikator ini adalah:

- 1. Faktor Pendorong:
Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.
- 2. Faktor Penghambat:
Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas.
- 3. Rencana tindak lanjut:
Pengoptimalkan satgas DRPPA dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan perempuan

2) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)



Gambar 3.14
Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Tabel 3.21
Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 s.d 2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	18	5	3	5	6	22
2.	Jumlah perempuan per 100.000	186.234	407.800	407.790	407.858	407.855	408.996
3.	Rasio pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	9,67	1,23	0,74	1,23	1,47	5,62

Dari Tabel 3.21 terlihat semua kasus yang melapor sudah tertangani sesuai dengan Standar Operasional Persedur, dari jumlah seluruh kasus yang terjadi pada perempuan pada Tahun 2020 paling tertinggi diantara pada tahun selanjutnya. Dari beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Temanggung, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi diantaranya adalah:

1. Faktor Pendorongnya adalah:
- a. Semakin meningkatnya pemahaman orang tua dan anak tentang perlindungan anak perempuan;

b. Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.
2. Faktor Penghambatnya adalah:
- Kurangnya pemahaman masyarakat atas hak anak dan perlindungan anak.

Untuk mencapai target Kinerja program menurunnya kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp38.394.370,00 dengan realisasi Rp20.235.350,00 sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp18.159.020,00 atau (52,70%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi 43,21% (selisih capaian kinerja sebesar 95,91% dengan realisasi anggaran 52,70%) Kinerja sasaran Program ini didukung dalam kegiatan:
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program 3: Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender. pemenuhan hak. serta perlindungan perempuan dan anak

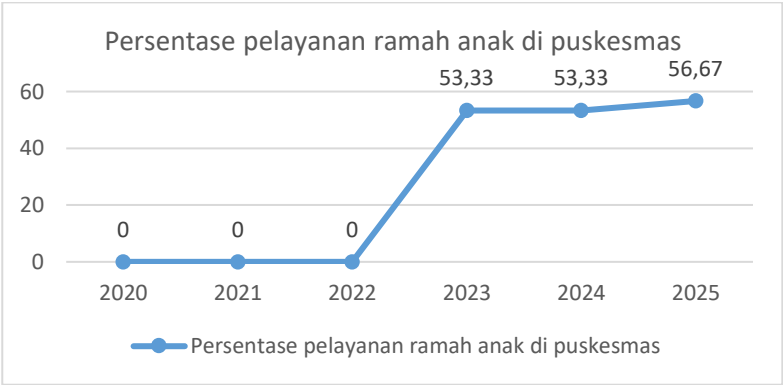
Tabel 3.22
Capaian Kinerja Program 3

PROGRAM :									
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender. pemenuhan hak. serta perlindungan perempuan dan anak									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
						(%)			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	65,38	69,23	65,38	94,44	100	65,38	65,38
Capaian Kinerja program									65,38

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Temanggung secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 94,44% dengan kategori “**sangat tinggi**” sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka di tahun 2025-2029 tercapai 65,38% kategori “**sedang**”.dengan indikator sebagai berikut:

1) Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas

Presentase pelayanan ramah anak di puskesmas di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 3.15 Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas

Tabel 3.23
Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan ramah anak	N.A	N.A	N.A	16	17	17
2	Jumlah Puskesmas yang ada	N.A	N.A	N.A	30	30	30
3	Persentase				53,33	53,33	56,67

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan yang mendukung gerakan sayang ibu dan anak di Kabupaten Temanggung pencapaiannya 56,67%, atau baru 17 yang menerapkan pelayanan ramah anak, dalam melayani dan peduli akan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka menurunkan AKB dan AKI. Capaian persentase Puskesmas ramah anak di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor pendorong:
Adanya komitmen manajemen Puskesmas dan Rumah Sakit untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan hak – hak anak
2. Faktor Penghambat:
Belum adanya kebijakan yang jelas dari manajemen Rumah sakit/Puskesmas untuk menerapkan standar.

Untuk mencapai target Kinerja program Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender. pemenuhan hak. serta perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp18.959.200,00 dengan realisasi Rp20.235.350,00 sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp17.833.250,00 atau (94,06%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi 0,38% (selisih capaian kinerja sebesar 94,44% dengan realisasi anggaran 94,06%) Kinerja sasaran Program ini didukung dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

d) Program 4: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Program 4

PROGRAM 4 :									
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif									
No	Indikator program	Satuan	Capaian	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
			Tahun 2024 (%)						
						(%)			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya (701)	Madya (612,8)	87,42	Nindya (750)	Madya (612,8)	81,71
2	Persentase terbentuknya DRPPA	%	2,42	2,47	6,57	100	85,47	6,57	7,69
Capaian Kinerja program							87,42		44,7

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 87,82% dengan kategori “**tinggi**,” sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka di tahun 2025-2029 tercapai 44,70% kategori **sangat rendah** dengan indikator sebagai berikut:

1. Kabupaten Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (Permen PPPA No 11 Tahun 2011). Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu:

- 1. Hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga;
- 2. Pengasuhan alternatif;
- 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
- 5. Perlindungan khusus.

Untuk mengukur keberhasilan KLA dapat dilihat dari kategori yang diperoleh Kabupaten terhadap evaluasi dan penilaian Kabupaten Layak Anak, dimana kategori tersebut meliputi: Pratama, Madya, Nindya dan Utama.

Adapun ukuran penilaian perkategori adalah :

1. Kategori Pratama dengan nilai : 500 – 600
2. Kategori Madya dengan nilai : 601 – 700
3. Kategori Nindya dengan nilai : 701 – 800
4. Kategori Utama dengan Nilai : 801 – 900

Adapun kondisi KLA di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 Triwulan IV penilaian dari Kementrian PPPA dengan jumlah nilai 612,80 dengan kategori Madya. Untuk kondisi KLA Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Kabupaten Layak Anak Kabupaten Temanggung

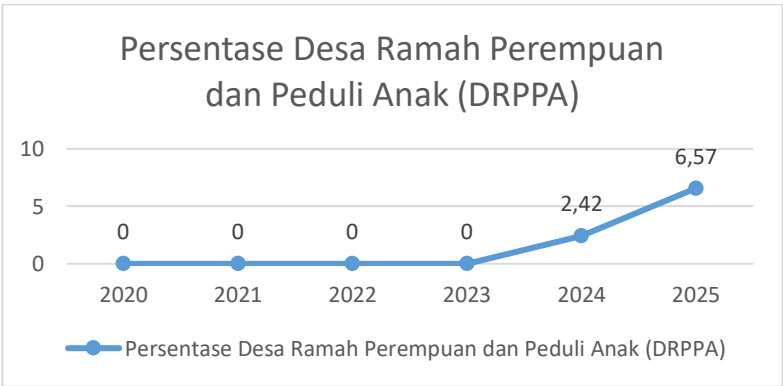
No	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kategori Kabupaten Layak Anak	N.A	N.A	Madya	Madya	Madya	Madya

Adapun faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor pendukungnya adalah adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).
- 2) Faktor penghambatnya adalah masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana (Kecamatan Layak Anak), belum semua Kecamatan terbentuk Forum Anak.

2. Persentase terbentuknya DRPPA

Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah desa atau kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 2 Tahun 2022).



Gambar 3.16 Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Tabel 3.26
Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s/d 2025

No	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah DRPPPA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7	19
2.	Jumlah Desa					289	289
3.	Persentase					2,42	6,57

Dari tabel diatas untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak baru di sosialisasikan dan diadvokasi pada tahun 2024. Pada tahun 2024 baru terbantu 7 desa, sedangkan pada Tahun 2025 sudah ada penambahan sebanyak 12 desa, jadi total 19 desa atau (6,57%). Dari capaian tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- 1. Faktor Pendorong:
Sudah terbentuknya kader PPPA di semua desa
- 2. Faktor Penghambat:
Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang isu gender dan perlindungan anak

Untuk mencapai target Kinerja program Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp40.335.500,00 dengan realisasi Rp39.139.500,00 (97,03). Terkait dengan sumber daya anggaran terjadi inefisiensi 9,61% (selisih capaian kinerja sebesar 87,42% dengan realisasi anggaran 97,03%) Kinerja sasaran Program ini didukung dalam kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- e. **Program 5: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak**

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Program 5

PROGRAM 5:									
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. eksploitasi. penelantaran. perkawinan. dan perlakuan salah lainnya terhadap anak									
No	Indikator program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
						(%)			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Perlindungan Anak	angka	61,62	62,2	61,62	99,07	68,19	61,62	90,37
2	Persentase pernikahan usia anak	%	0,124	0,105	0,049	100	0,059	0,049	100,00
3	Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100,00
4	Rasio kasus kekerasan terhadap anak	%	9,37	8,93	8,79	100,00	6,69	8,79	76,11
Capaian Kinerja program						99,77			91,62

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Kabupaten Temanggung secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 99,77% dengan kategori “**sangat tinggi**”, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2025- 2029 tercapai 91,62% kategori “**sangat tinggi**” dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks Perlindungan anak

Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Indikator yang menggambarkan pencapaian hak-hak anak, dan perlindungan khusus anak, indeks ini biasanya disusun dari beberapa sub-indeks dan indikator yang mencerminkan:

- a) Hak atas identitas (misalnya kepemilikan akta kelahiran).
 - b) Hak pengasuhan dan lingkungan keluarga.
 - c) Hak kesehatan dasar.
 - d) Hak pendidikan.
 - e) Perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.
- Semakin tinggi nilai IPA, semakin baik tingkat perlindungan anak di daerah.



Gambar 3.17 Indeks Perlindungan Anak

Tabel 3.28
Capaian Index Perlindungan Anak (IPA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s/d 2025

No	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indek Perlindungan Anak	N.A	N.A	N.A	61,62	61,62	61,62

Sumber data: New SIGA PPPA

Perhitungan IPA ini berdasarkan aplikasi dari New SIGA Kementerian PPPA dan capaian angka tersebut terakhir pada tahun 2023 dan belum ada capaian ditahun selanjutnya. Capaian Index Perlindungan Anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- a) Faktor Pendorong:
 1. Adanya kerjasama lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, kepolisian, dan desa).
 2. Tersedianya layanan pengaduan dan penanganan kasus
- b) Faktor Penghambat:

Masih terjadi kasus kekerasan, pernikahan anak, eksploitasi, dan penelantaran.

2. Persentase pernikahan usia anak

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk pernikahan yang terjadi menurut hukum negara, hukum adat, maupun agama,

atau hidup bersama layaknya suami istri meskipun tanpa pencatatan resmi Buku Panduan Pencegahan Perkawinan Anak (Kemen PPPA, 2020)

Rumus persentase pernikahan usia anak: Jumlah anak yang menikah dibawah usia 18 tahun dibagi jumlah total anak dalam kelompok usia tersebut x 100%.

Capaian persentase pernikahan anak Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 adalah:



Gambar 3.18 Persentase Pernikahan Usia Anak

Tabel 3.29
Persentase pernikahan usia anak
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s/d 2025

No	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pernikahan usia anak	581	449	414	259	277	91
2.	Jumlah anak	232.967	232.967	231.111	230.860	224.031	216.058
3.	Persentase pernikahan anak	0,25	0,19	0,18	0,11	0,124	0,042

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa capaian persentase pernikahan usia anak baru didapat data pada tahun 2024 dan 2025 dimana capaian ini semakin menurun. Adapun persentase pernikahan anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Faktor Pendorong:
Peran aktif masyarakat, PKK, forum anak, PATBM, terkait kampaye jo kawin bocah.
- b) Faktor penghambat:
Budaya patriarki dan normalisasi kekerasan.
- c) Rencana Tindak Lanjut:
Penguatan koordinasi lintas sektor (sekolah, kesehatan, hukum, sosial).

3. Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani

Digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan kasus kekerasan anak oleh lembaga layanan atau perangkat daerah terkait. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus anak yang berhasil ditangani dengan jumlah kasus anak yang dilaporkan dalam satu periode pelaporan. Rumus Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani adalah Jumlah kasus kekerasan anak yang ditangani dibagi jumlah kasus kekerasan anak yang melaporkan dikalikan 100%. Capaian persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani kabupaten Temanggung:

Tabel 3.30
Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s/d 2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak kasus kekerasan anak yang melapor	33	6	11	8	9	19
2	Jumlah anak kasus kekerasan anak yang ditangani	33	6	11	8	9	19
3	Presentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada periode Tahun 2020–2025 telah tertangani 100% sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang melapor sama dengan jumlah kasus yang ditangani setiap tahunnya. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebanyak 33 kasus, kemudian mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2021 menjadi 6 kasus. Pada Tahun 2022 hingga Tahun 2024 jumlah kasus relatif stabil, sedangkan pada Tahun 2025 kembali mengalami peningkatan menjadi 19 kasus. Adapun beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi diantaranya adalah :

a) Faktor Pendorong:

Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

b) Faktor Penghambat:

Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas

4. Rasio kasus kekerasan terhadap anak

Rasio kasus kekerasan terhadap anak adalah angka yang menunjukkan Perbandingan antara jumlah kasus yang dialami anak dalam 1 tahun tertentu dengan jumlah total penduduk anak.

Rumus Rasio kasus kekerasan terhadap anak adalah jumlah anak di wilayah tersebut dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak dikalikan 100.000 penduduk anak. Rasio kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 3.19 Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Tabel 3.31
Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s/d 2025

No	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	33	6	11	8	9	16
2.	Jumlah penduduk anak	232.967	232.967	231.111	230.860	223.993	216.058
3.	Rasio pelayanan kasus kekerasan terhadap anak	14,17	2,58	4,76	3,47	4,02	7,41

Berdasarkan tabel diatas dari Tahun 2020 rasio kekerasan terhadap anak paling tinggi di Tahun 2020 dan terendah pada tahun 2021, dari capaian diatas pada tahun 2025 dari 100.000 anak ada 7,41% yang mengalami kekerasan. Adapun faktor pendorong dan penghambatnya dalam penanganan kasus terhadap anak adalah:

- a) Faktor Pendorong adalah :
1. Adanya regulasi dan kebijakan nasional yang mengatur perlindungan terhadap anak;

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak;

3. Adanya layanan pengaduan kekerasan terhadap anak, lewat Aplikasi SIPESAN PERAK;

4. Keterlibatan berbagai sektor hukum, pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama dalam menangani kasus anak.
- b) Faktor Penghambat adalah:

1. Kurangnya dan kesedaran masyarakat tentang hak hak anak;
2. Minimnya pelaporan karena Anak.

Untuk mencapai target Kinerja program meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp88.364.400,00 dengan realisasi Rp73.931.100,00 (83,66%), terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi 16,11% (selisih capaian kinerja sebesar 99,77% dengan realisasi anggaran 83,66%) kinerja sasaran program ini didukung dalam kegiatan:

- a. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA.
- b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program 6: Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Program VI

PROGRAM :									
Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk									
No	Indikator program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,6	58,7	60,1	100	59,2	60,1	100
2	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed)	%	7,6	7,59	7,44	100	7,54	7,44	100
3	Median usia kawin pertama (MUKP)	angka	19,8	19,9	22	100	20,5	22	100
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	&	9,48	9,32	4,01	100	8,7	4,01	100
Capaian Kinerja program				100			100		

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk Kabupaten

Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 100%. Dengan kategori “*sangat tinggi*,” sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2025-2029 tercapai 100% kategori “*sangat tinggi*” dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indeks komposif yang menggambarkan sejauh mana variabel–variabel kependudukan telah diarustamakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan aspek kependudukan, meliputi dimensi pemerataan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta kualitas hidup penduduk. Capaian IPBK Kabupaten Temanggung, dari tahun 2021-2025.

Tabel 3.33
Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

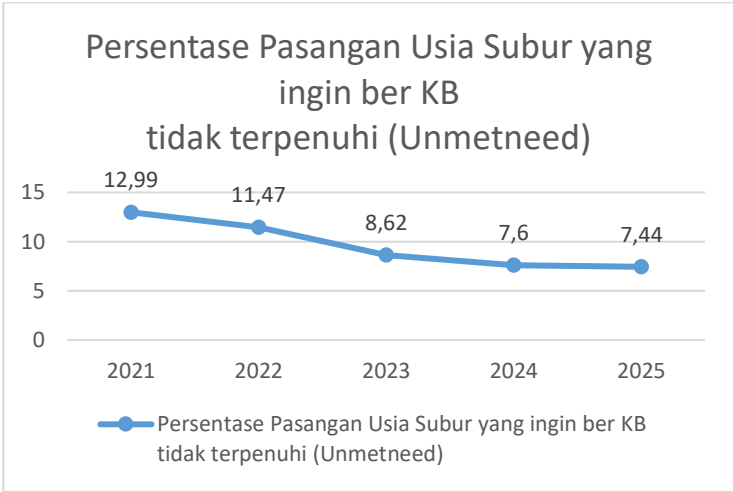
NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	IPBK	n.a	n.a	n.a	58,6	58,6

Capaian IPBK diperoleh dari data yang dihitung oleh BKKBN dan data ini baru muncul pada tahun 2024 berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dipublikasikan pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu data pada tahun 2025 masih menggunakan capaian pada tahun 2024.

- a) Faktor yang mempengaruhi capaian ini adalah:
- 1) Penundaan usia perkawinan;
 - 2) Perubahan nilai budaya dari nilai tradisional menuju individualistik;
 - 3) Gaya hidup urban, banyak anak banyak beban hidup di kota;
 - 4) Tingginya biaya hidup, dengan tinggi biaya pendidikan, perumahan dan kesehatan, dan orang cenderung mempunyai anak sedikit;

2. Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi/ Unmetned

Unmetneed merupakan jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (Tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur hamil, Ingin anak segera (IAS), Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Adapun data Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.



Gambar 3.20 Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)

Tabel 3.34
Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 s.d 2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah PUS Unmetneed	17.012	15.084	11.059	9.493	9049
2.	Jumlah PUS	130.996	131.516	128.226	124.978	121.698
3.	Persentase	12,99	11,47	8,62	7,6	7,44

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a) Faktor Pendorong:

1.

Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral, terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja, inya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja;

2.

Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral;

3.

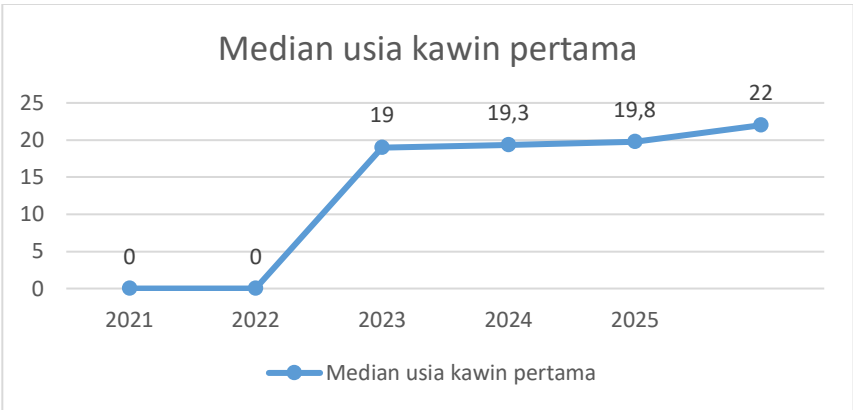
pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga.
- b) Faktor Penghambat:

Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja.

3. Median usia kawin pertama (MUKP)

Median Usia Kawin Pertama adalah usia di mana 50 persen perempuan (atau laki-laki) dalam kelompok umur tertentu telah menikah untuk pertama kalinya, dan 50 persen lainnya belum menikah. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pola dan kecenderungan usia perkawinan pertama, yang

berpengaruh terhadap angka kelahiran, kesehatan reproduksi, serta pembangunan kependudukan secara umum. Capaian Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun adalah:



Gambar 3.21 Median Usia Kawin Pertama

Tabel 3.35
Median Usia Kawin Pertama
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 TW IV

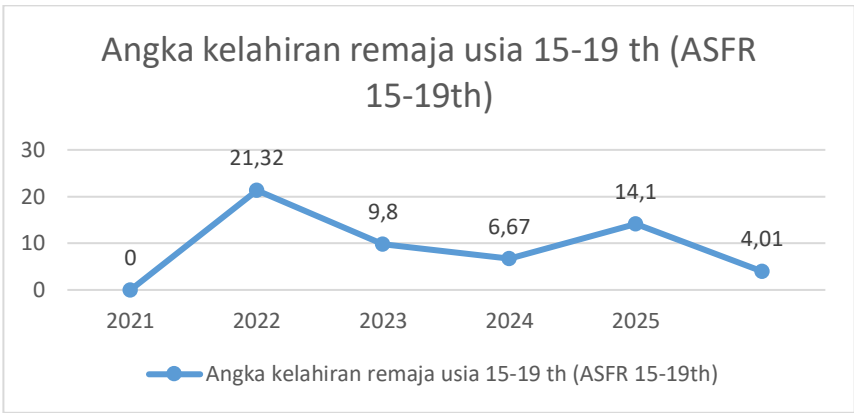
No	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Median usia kawin pertama	n.a	na	19	19,3	19,8	22

Capaian Median Usia Kawin pertama dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a) Faktor Penghambat:
Anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi.
- b) Faktor Pendorong:
Lebih banyak peluang kerja di sektor formal maupun informal.

4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)

ASFR (Age Spesifik Fertility Rates) adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur tertentu. Sedangkan ASFR 15–19 Tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15–19 tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas dari wanita usia subur menurut kelompok umurnya. Capaian Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun adalah:



Gambar 3.22 Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)

Tabel 3.36
Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan IV

No	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelahiran oleh kelompok umur 15 – 19 th	N.A	616	276	177	316	125
2	Jumlah wanita usia 15 – 19 th	N.A	28.899	28.166	26.553	22.414	31.134
3	Persentase		21,32	9,8	6,67	14,1	4,01

Capaian indikator ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Faktor pendorong : Peningkatan Kesadaran Keluarga Berencana.
- b) Faktor Penghambat : Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduk.

Untuk mencapai target Kinerja program terkendalinya pertambahan jumlah penduduk pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp493.400.000,00 dengan realisasi Rp447.330.373,00 (90,59%), terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi 9,41 % (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 90,59 % Kinerja sasaran Progran ini didukung dalam kegiatan :

- a) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
- b) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
- c) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

b. Program 7: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB).

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Program 7

PROGRAM 7:									
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)									
No	Indikator program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,45	46,7	48,68	100	47,95	48,68	100
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	77,5	77,7	82,54	100	80	82,54	100
3	Persentase KB pasca persalinan	%	52,42	57,4	52,09	90,75	70	52,09	74,41
4	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	14,88	15,22	15,57	100	18,68	15,57	83,35
Capaian Kinerja program						97,69			89,44

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB) Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 97,69% dengan kategori “**sangat tinggi**”, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2025-2029 tercapai 89,44% kategori “**Tinggi**” dengan indikator sebagai berikut:

1. **Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang**
- PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP dan MOW). Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 3.23 Jumlah Peserta KB MKJP

Tabel 3.38
Jumlah Peserta KB MKJP Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

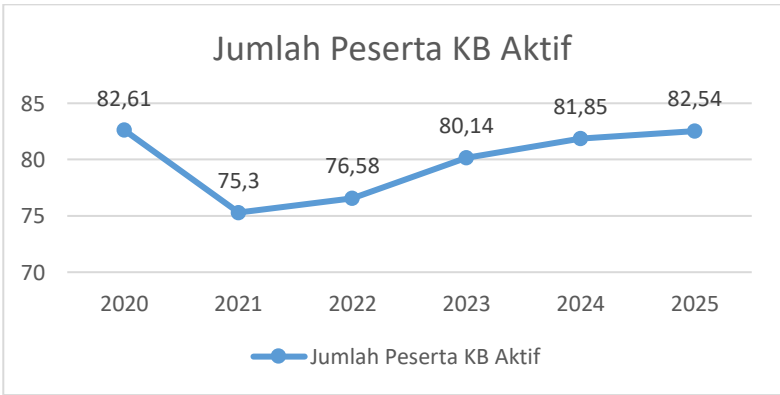
NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Peserta KB MKJP	107.739	98.622	100.714	47.176	47.514	48.902
2	Jumlah (PUS) yang berKB	130.415	130.966	131.516	103.082	102.297	100.451
3	Persentase	82,61	75,3	76,58	45,77	46,45	48,68

Capaian peserta KB berdasar hasil laporan SIMANTAP KON KB tercapai 48.902 atau 48,68% dari peserta KB sebanyak 100.451. Adapun Permasalahan turunnya MKJP adalah:

- a) Masih tingginya Rhumor kegagalan IUD di masyarakat;
- b) Dukungan anggaran pencabutan Implan rendah berakibat peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB lagi, menjadi PUS DO;
- c) Masih rendahnya animo masyarakat dalam pelayanan KB MOW dan MOP.

2. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP. Capaian peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 3.24 Jumlah Peserta KB Aktif

Tabel 3.39
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d 2025

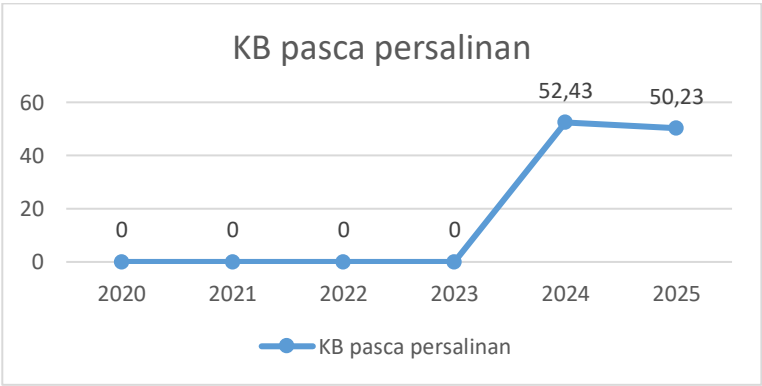
No	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Peserta KB Aktif	107.739	98.622	100.714	103.082	102.297	100.451
2	Jumlah PUS	130.415	130.966	131.516	128.622	124.978	121.698
3	Persentase	82,61	75,3	76,58	80,14	81,85	82,54

Dari capai Peserta KB aktif sebesar 82,54 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Faktor Pendorong adalah:
- 1. Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB;
 - 2. Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan stake holder;
 - 3. Mobilias media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi.
- b) Faktor Penghambat adalah:
- 1. Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern;
 - 2. PUS muda yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan.

3. Persentase KB pasca persalinan

KB pasca persalinan adalah pelayanan kontrasepsi yang diberikan kepada ibu segera setelah melahirkan hingga 42 hari (6 minggu) pasca persalinan. KB Pasca Persalinan mencakup pemberian metode kontrasepsi jangka pendek maupun jangka panjang (MKJP), seperti IUD pasca plasenta, implan, suntikan, pil, maupun kondom, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ibu pasca melahirkan. Capaian KB pasca persalinan di kabupaten Temanggung dari tahun 2021 sampai tahun 2025, adalah sebagai berikut



Gambar 3.25 KB pasca persalinan

Tabel 3.40
KB Pasca Persalinan

Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025							
NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan	n.a	n.a	n.a	n.a	4.262	3.751
2.	Jumlah PUS Yang baru melahirkan	n.a	n.a	n.a	n.a	8.129	7.201
3.	Perseantase	n.a	n.a	n.a	n.a	52,43	50,23

Capaian Persentase KB pasca persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a) Faktor pendorong:

Ketersediaannya alat kontrsepsi dan koordinasi yang baik terkait kegiatan pelayanan kb pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.
- b) Faktor Penghambat:

Adanya mitos tentang efek samping penggunaan alokon pasca persalinan.

4. **Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri**

Kampung KB Keluarga berkualitas mandiri adalah kampung KB yang telah mampu mengelola dan mengembangkan kegiatan program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) serta program pembangunan lintas sektor secara mandiri berkelanjutan dan berkualitas. Capaian Kampung KB Keluarga berkualitas dengan kategori mandiri sejak tahun 2021 sampai 2025 sebagai berikut:



Gambar 3.26 Kampung KB Keluarga berkualitas dengan kategori mandiri

Tabel 3.41
 Kampung KB Keluarga berkualitas dengan kategori mandiri
 Kabupaten Temanggung Tahun 2020- 2025 TW IV

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kampung KB Keluarga berkualitas dengan kategori mandiri	6	14	28	32	43	45
2.	Jumlah Kampung KB Keluarga Berkualitas	289	289	289	289	289	289
3.	Persentase	2,08	4,84	9,69	11,07	14,88	15,57

Capaian Kampung KB Keluarga berkualitas dengan kategori mandiri dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a) Faktor Penghambat Kampung KB

1. Belum adanya Perbup Kampung KB;
2. Kurangnya Sosialisasi pengembangan kampung KB pada lintas sektor OPD;
3. Tidak adanya dana APBN untuk pembentukan Kampung KB;
4. Kurangnya koordinasi di lini lapangan, dari PKB, Desa, Pokja Kampung KB, linsek kec dan masyarakat;
5. Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan kampung KB;
6. Belum semua desa kampung KB mau mengembangkan Kampung KB dari setara dusun menjadi setara desa;
7. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang pengembangan kampung KB.

b) Faktor Pendorong dalam Kampung KB

1. Adanya potensi kader di kampung Kb yg bisa di berdayakan;
2. Adanya dana desa yg bisa di anggarkan untuk pengembangan kampung KB;
3. Adanya dukungan dari masyarakat;
4. Adanya dukungan dari stakeholder, toma, toga;
5. Adanya Tim Pengembangan kampung KB kabupaten.

Untuk mencapai target Kinerja program meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB) didukung anggaran sebesar Rp7.478.149.000,00 dengan realisasi Rp5.716.323.034,00 (76,52%), sehingga Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi 21,17% (selisih capaian kinerja sebesar 97,69% dengan realisasi anggaran 76,52%) kinerja sasaran program ini didukung dalam kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian

- Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
 - 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dan Peningkatan pelayanan KB MKJP dalam moment strategis
 - 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:



Gambar 3.27 Bhakti Sosial Pelayanan KB khususnya KB MKJP IUD dan Implant di Puskesmas Kedu. Rabu, 26 Februari 2025



Gambar 3.28 Pelayanan KB MKJP MOW 5 orang akseptor di RSUD Temanggung
Senin, 22 September 2025

c. Program VIII: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Program VIII

PROGRAM 8 :									
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)									
No	Indikator program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
						(%)			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,53	45,56	50,23	100	46,03	50,23	100
2	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,23	87,3	86,8	99,43	87,8	86,8	98,86
3	Indeks lansia berdaya	angka	57,53	57,9	75,9	100	58,4	75,9	100
Capaian Kinerja program						99,81			99,62

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS) Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 99,81% dengan kategori **sangat tinggi**. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2025-2029 tercapai 99,62% kategori **sangat tinggi** dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah program pemberdayaan keluarga yang memiliki anak usia 0–5 tahun melalui pendidikan dan penyuluhan tentang pengasuhan, tumbuh kembang, kesehatan, dan gizi balita, agar orang tua mampu memberikan pengasuhan yang tepat, berkualitas, dan stimulasi perkembangan anak secara optimal. Capaian Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita Kabupaten Temanggung adalah:



Gambar 3.29 Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan BKB

Tabel 3.43
Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Balita
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 samapai Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah keluarga yang mengikuti BKB	n.a	n.a	n.a	n.a	11.594	12.721
2.	Jumlah keluarga yang memiliki balita	n.a	n.a	n.a	n.a	25.463	25.325
3.	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	45,53	50,23

Capaian Presentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a) Faktor pendorong:

1. Partisipasi kader BKB dalam penyuluhan kepada sasaran BKB;

2. Ketersedian alat permainan Eduksi terutama pada kelompok yang menjadi lokus Stunting;

3. Kader BKB telah dilatih.

b) Faktor Penghambat:

1. Belum optimalnya integrasi layanan BKB dengan posyandu dan PAUD;

2. Rendahnya kehadiran orang tua dalam kegiatan BKB.
2. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja
- Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan, keterlibatan, dan kualitas praktik pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak usia remaja (10–24tahun). Indeks ini menilai sejauh mana keluarga memberikan Perhitungan Indeks Pengasuhan Remaja (IPR) yang digunakan BKKBN di Indonesia adalah dengan menggabungkan 9 indikator kunci yang mengukur aspek pengasuhan keluarga terhadap remaja, seperti legalitas diri, akses pendidikan, jaminan kesehatan, dan jaminan masa depan. Capaian IndeK pengasuhan keluarga yang memiliki remaja yang dihitung BKKBN adalah 87,23%, data ini baru dirilis pada akhir tahun 2024, sedangkan untuk capaian 2025 masih menggunakan angka tersebut:
- LKJIP Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

120



Gambar 3.30 Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja

Tabel 3.44
Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja
Kabupaten Temanggung, Tahun 2020–2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indek pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	n.a	n.a	n.a	n.a	87,23	87,23

Capaian indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja, dipengaruhi oleh beberapa faktor:

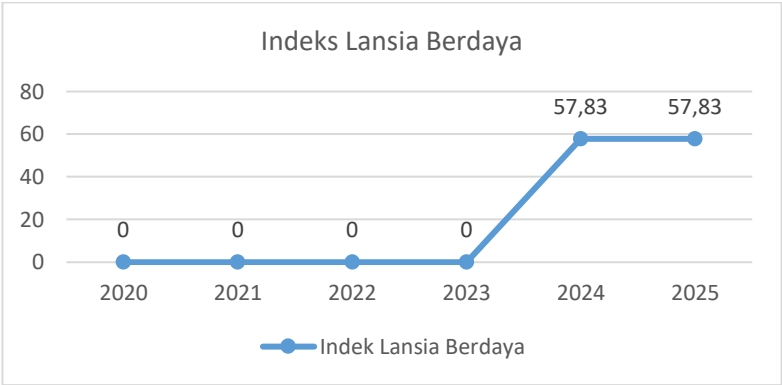
- a) Faktor pendorong:
Ketersediaan Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) yang aktif di desa/kelurahan.
- b) Faktor Penghambat:
Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja yang tidak terkontrol, sehingga menyulitkan orang tua dalam pengasuhan

3. Indek Lansia Berdaya

Indek Lansia Berdaya adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemandirian, kualitas hidup, serta peran aktif lanjut usia (lansia) dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Indeks ini menilai sejauh mana lansia mampu:

- 1. Mengakses layanan kesehatan dan menjaga kebugaran;
- 2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat; dan
- 3. Memiliki kemandirian dalam aktivitas sehari-hari.

Capaian Indek Lansia Berdaya Kabupaten Temanggung sebesar 57,83 Perhitungan angka ini dihitung oleh BKKBN yang dipublikasikan pada akhir tahun 2024, jadi untuk capaian di tahun 2025 masih menggunakan angka yang sama pada tahun 2024 karena hasil perhitungan BKKKBN belum dipublikasikan.



Gambar 3.31 Indeks Lansia Berdaya

Tabel 3.45
Indeks Lansia Berdaya
Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 – 2025

No	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indek Lansia Berdaya	n.a	n.a	n.a	n.a	57,83	57,83

Sumber data BKKBN Tahun 2024

Capaian indeks Lansia Berdaya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a) Faktor Pendorong:

- 1. Ketersediaan posyandu lansia yang aktif dan terjadwal;
- 2. Tingginya keterlibatan lansia dalam kegiatan masyarakat, seperti keagamaan, adat, atau kemasyarakatan.

b) Faktor Penghambat:

Keterbatasan kader lansia serta kurangnya pelatihan untuk pembinaan kelompok lansia.

Untuk mencapai target Kinerja program meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS) didukung anggaran sebesar Rp4.249.053.450,00 dengan realisasi Rp263.667.220,00 (93,79%), sehingga Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi 6,02% (selisih capaian kinerja sebesar 99,81% dengan realisasi anggaran (93,79%) Kinerja sasaran Progran ini didukung dalam kegiatan:

- 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; yang dilaksanakan dalam beberapa sub kegiatan :
 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - Fasilitasi kelompok kegiatan Peningkatan Ketahanan Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPPKA dan PIK-Remaja)

Fasilitasi kegiatan pemilihan Duta Genre

2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Yang dilaksanakan dalam beberapa sub kegiatan :

- Pendampingan dan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Temanggung.

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:



Gambar 3.32 Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Sabtu, 01 November 2025



Gambar 3.33 Pengembangan Kelompok BKL Mandiri Menuju Lansia Berdaya (SIDAYA) dan Wisuda Sekolah Lansia Standar 2 (S-2) WEDHO PANGRENGGO JIWO Desa Tlogowero Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
Senin, 03 November 2025

Dari capaian sasaran strategis indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentunya juga didukung oleh urusan penunjang yaitu program Penunjang urusan Perangkat Daerah pada tahun 2025 yaitu pada tabel 3.46 berikut ini:

Tabel 3.46
Capaian indikator kinerja program

PROGRAM :								
Terpenuhinya Urusan Penunjang Perangkat Daerah								
Indikator program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
Terpenuhinya Urusan Penunjang Perangkat Daerah	%	94,4	100	98,34	98,34	100	98,34	98
Capaian Kinerja program					98,34			98,34

Untuk mencapai target Kinerja Program penunjang urusan Daerah ini pada tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp 4.230.485.522,00 dengan realisasi Rp 3.927.998.177,00 atau sebesar 92,85%, sehingga efesensi anggaran sebesar 5,46% (selisih capaian kinerja program dengan capaian realisasi anggaran) .

Adapun pencapaian kinerja program secara keseluruhan dirinci dalam tabel 3.47 sebagai berikut:

Tabel 3.47
Pencapaian Kinerja Program

No	Sasaran	Jumlah indikator	Rata – rata Capaian	Keterangan (kategori)
1	Program Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	2	100	Sangat Tinggi
2	Program Perlindungan Perempuan	2	95,91	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	94,44	Sangat Tinggi
4	Program Pemenuhan Hak Anak /PHA	2	87,42	Tinggi
5	Program Perlindungan Khusus Anak	4	99,77	Sangat Tinggi
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / kota	1	98,34	Sangat Tinggi
7	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	4	100	Sangat Tinggi
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4	97,69	Sangat Tinggi
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1	99,81	Sangat tinggi

c. Indikator Kinerja yang terdapat pada PK awal Tahun tetapi tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Sasaran dalam PK Perubahan

Tabel 3.48

Tabel Indikator kinerja sasaran yang terdapat pada PK awal tahun, tetapi tidak lagi menjadi indikator kinerja Sasaran dalam PK perubahan:

SASARAN :						
Meningkatnya Kebijakan Responsif gender						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
						(%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	%	8,22	9,21	10,49	100
2	Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	100	100	100	100
3	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	100	0,0027	0,0055	50,77
4	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	100	62,63	100	100
5	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%	100	100	100	100
6	Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	100	1,85	0,33	100
7	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	100	88,6	90,4	100

- Jika dibandingkan Tahun 2024 terdapat perubahan indikator sebagai berikut:
1. Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada RPD Tahun 2024–2026, menjadi indikator sasaran dengan capaian 10,49%, namun pada kinerja Tahun 2025–2029 menjadi indikator program.
 2. Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD, RPD Tahun 2024 – 2026 capaiannya 100%, sedangkan di Tahun 2025–2029 sudah tidak menjadi indicator, karena semua PD sudah Menyusun Anggaran responsive Gender dalam penyusunan RKA.
 3. Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada RPD Tahun 2024 capaiannya masih sangat rendah 50,77% , namun di Tahun 2025–2029, indikator tidak ada ,karena sudah ada indikator presentase kekerasan terhadap Perempuan dan presentase kekerasan terhadap anak.

- Persentase desa sayang ibu dan bayi pada RPD Tahun 2024 capaiannya 100%, namun di tahun 2025–2029, tidak lagi dimasukkan sebagai indikator urusan PPPA karena secara substansi dan pelaksanaannya lebih berkaitan langsung dengan sektor kesehatan.
- Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga pada RPD Tahun 2024, capaiannya 100%, namun di tahun 2025–2029, tidak lagi dimasukkan sebagai indikator urusan PPKB. Perubahan ini merupakan bagian dari proses penajaman indikator agar lebih fokus pada outcome atau dampak program, bukan semata pada ketersediaan instrumen pendukung.
- Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun Keluarga pada RPD Tahun 2024, capaiannya 100%, namun di tahun 2025 – 2029, tidak lagi dimasukkan sebagai indikator urusan PPKB. Perubahan ini dilakukan dalam rangka penajaman indikator agar lebih fokus pada capaian strategis yang secara langsung mencerminkan keberhasilan program PPKB. Indikator tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan isu perkawinan usia anak dan pencegahan perkawinan dini,persentase perkawinan usia anak sudah menjadi indicator pada urusan PPPA.
- Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern. pada RPD Tahun 2024, capaiannya 100%, namun di tahun 2025–2029, tidak lagi dimasukkan sebagai indikator urusan PPKB . Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari proses harmonisasi dan penajaman indikator kinerja sesuai prinsip perencanaan pembangunan berbasis hasil (result-oriented).

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi anggaran tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun anggaran 2025 di dukung dengan anggaran sebesar Rp16.738.348.912,00, anggaran tersebut berasal DAU dan DAK secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

Tabel 3.49
Realisasi anggaran tahun 2025
Per 31 Desember 2025

Nama Rekening	Anggaran DPA	REALISASI	PERSEN TASE
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	16.654.647.242	14.251.357.364	85,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.230.485.522	3.927.998.177	92,85
Administrasi Keuangan	3.329.462.226	3.074.477.984	92,34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.329.462.226	3.074.477.984	92,34

Nama Rekening	Anggaran DPA	REALISASI	PERSEN TASE
1	2	3	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.275.000	36.657.797	93,34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000	1.361.000	97,21
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.815.000	6.779.000	99,47
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.200.000	4.159.400	99,03
Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.860.000	10.534.100	88,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	13.824.297	92,16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	787.767.696	747.236.146	94,85
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.862.000	4.693.000	96,52
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000	29.281.833	90,10
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	5.860.000	97,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	744.405.696	707.401.313	95,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.980.600	69.626.250	94,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.800.000	12.954.000	93,87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.180.600	34.193.250	97,19
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	18.490.000	92,45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	3.989.000	79,78
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.100.800	23.180.350	92,35
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	7.738.000	6.816.700	88,09
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	7.738.000	6.816.700	88,09
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.362.800	16.363.650	94,25
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.362.800	16.363.650	94,25
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	38.394.370	20.235.350	52,70
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38.394.370	20.235.350	52,70
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.394.370	20.235.350	52,70
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	18.959.200	17.833.250	94,06
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.959.200	17.833.250	94,06
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.959.200	17.833.250	94,06
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	40.335.500	39.139.500	97,03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.335.500	39.139.500	97,03

Nama Rekening	Anggaran DPA	REALISASI	PERSEN TASE
1	2	3	4
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.335.500	39.139.500	97,03
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	88.369.400	73.931.100	83,66
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66.294.600	64.440.050	97,20
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	66.294.600	64.440.050	97,20
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.074.800	9.491.050	42,99
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.074.800	9.491.050	42,99
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	493.800.000	447.330.373	90,59
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	493.800.000	447.330.373	90,59
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	59.346.450	98,91
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000	197.245.750	90,56
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	216.000.000	190.738.173	88,30
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.470.149.000	5.716.323.034	76,52
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.919.320.000	1.418.182.377	73,89
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.139.160.000	953.427.477	83,70
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcak), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	400.000.000	220.359.900	55,09
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000	85.724.250	68,58
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.160.000	4.837.250	93,75
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000	153.833.500	61,53
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.874.672.000	2.454.682.250	85,39
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.176.840.000	1.776.720.550	81,62
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	697.832.000	677.961.700	97,15
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.126.757.000	1.477.091.557	69,45
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.300.000	31.347.050	94,14
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.063.307.000	1.424.564.757	69,04

Nama Rekening	Anggaran DPA	REALISASI	PERSEN TASE
1	2	3	4
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.150.000	21.179.750	70,25
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	549.400.000	366.366.850	66,68
Fasilitasi pengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas	275.000.000	252.783.500	91,92
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	274.400.000	113.583.350	41,39
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.249.053.450	3.985.386.230	93,79
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	198.298.000	170.100.845	85,78
Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	13.500.000	10.635.250	78,78
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	28.800.000	10.855.900	37,69
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	25.998.000	23.533.300	90,52
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	130.000.000	125.076.395	96,21
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.050.755.450	3.815.285.385	94,19
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	31.355.450	26.935.750	85,90
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.827.000.000	1.627.729.635	89,09
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.192.400.000	2.160.620.000	98,55
TOTAL	16.654.647.242	14.251.357.364	85,57

Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.50.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa	prosentase
1	Belanja Daerah	16.654.647.242	14.251.357.364	2.403.289.878	85,57
	Belanja Operasi	15.991.706.842	13.606.173.164	2.385.533.678	85,08
	Belanja Modal	662.940.400	645.184.200	17.756.200	97,32

Sumber : Laporan Keuangan DPPPAPPKB

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk total belanja sebesar Rp14.251.357.364,00 (85,57%) dari total anggaran Rp16.654.647.242,00.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang program PPPA dan PPKB adalah Penghargaan Apresiasi Pengelolaan DAK Sub Bidang KB bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.



BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga berencana pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan sudah semua berhasil, namun masih ada 1 indikator program yang masih perlu ditingkatkan. semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori rata rata **Sangat Tinggi**, Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan dengan pencapaian rata – rata sebesar 98,57%,
- b. Dinas PPPAPKB menggunakan dana lebih kecil dari dana yang dianggarkan, dengan penyerapan dana sebesar 85,87 % Hal ini berarti terjadi efisiensi anggaran yang disediakan sebesar 12,7% (selisih antara rata rata capaian kinerja dilurangi persentase realisasi anggaran)

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di masa mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung dimasa mendatang antara lain:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak:
 - a. Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada perangkat daerah;

- b. Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan melalui penguatan UPTD PPA dan jejaring layanan;
 - c. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye perlindungan anak;
 - d. Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui pemenuhan indikator-indikator KLA, dengan lintas sektoral ; dan
 - e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi perempuan dan kelompok masyarakat dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Bersama dengan organisasi GOW .
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Memperkuat pendataan keluarga dan pemutahiran data Kependudukan secara berkala ,sebagai dasar dan perencanaan program kegiatan .
 - b. Meningkatkan advokasi kepada pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan terkait pentingnya program Bangga Kencana;
 - c. Melaksanakan kegiatan KIE kepada masyarakat mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, serta pendewasaan usia perkawinan;
 - d. Mengoptimalkan media komunikasi dan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program KB;
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan KB di fasilitas kesehatan.
 - f. Mengoptimalkan peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), kader KB, dan kelompok kegiatan keluarga (BKB, BKR, BKL, dan UPPKA).

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 untuk DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, 26 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung,



Dra. Gema Artist Wahyudi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197007301990012002

b.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telepon/Faximili(0293) 491059
suratelektronik: dpppappkb@temanggungkab.go.id laman: dpppappkb.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Jabatan : KEPALA DPPPAPPKB

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

Pihak Pertama,
KEPALA DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP . 19700730 199001 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN KEPALA DPPPAPKB KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10,22
2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,60
3	Terselesainya penugasan direktif pimpinan dengan penuh tanggung jawab	Penugasan direktif pimpinan	1,00
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	35.000.000	DAU
2	Program Perlindungan Perempuan	42.842.200	DAU
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	25.000.000	DAU
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	45.000.000	DAU
5	Program Perlindungan Khusus Anak	35.000.000	DAU
6	Program Pengendalian Penduduk	493.800.000	DAK
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.474.989.000	DAU DAN DAK
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.268.200.000	DAU dan DAK
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.576.461.471	DAU
	JUMLAH	16.996.292.671	

Pihak Kedua
PJ.BUPATI TEMANGGUNG

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama
KEPALA DPPPAPKB KAB TMG

Drs. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19708730 199001 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. Jendral Sudirman No. 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293)
491059 Fax. 492182 Kode Pos 56218
Surat elektronik: dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHABIB MUALIM, SKM,M Kes,MM

Jabatan : SEKRETARIS DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Jabatan : KEPALA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

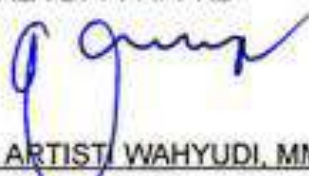
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA DPPPAPPKB


Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197007301999012002

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPPPAPPKB


KHABIB MUALIM, SKM, M Kes, MM

Pembina Tingkat I

NIP . 196804251988021001

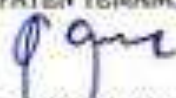
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN SEKRETARIS DPPPAPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi umum dan administrasi kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian	100%
		Persentase pengelolaan kearsipan perangkat daerah	100%
		Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%
		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan	100%
		Persentase Penyusunan laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase Penyusunan dokumen pelaporan	100%
		Persentase Penyusunan dokumen keuangan	100%
		Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan penunjang perangkat daerah	Persentase kebutuhan umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%
3	Terselesainya penugasan direktif pimpinan	Terlaksananya penugasan direktif pimpinan dengan penuh tanggung jawab	12 kegiatan

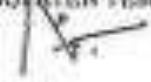
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,576,461.471	DAU
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	DAK Non Fisik
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.139.160.000	DAK Non Fisik
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	697.832.000	DAK Fisik
JUMLAH		6.473.453.471	

Temanggung, 13 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PPPAPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dns. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700730 199001 2 002

Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS PPPAPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG


KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680425 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
(Jl. Jendral Sudirman No. 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp./Faximil (0293)
491059 Fax. 492102 Kode Pos 56218
Surel elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI AGUS SUTOPO, SH

Jabatan : KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Jabatan : KEPALA DPPPAPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DPPPAPKB

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197007301999012002

Pihak Pertama,
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA

TRI AGUS SUTOPO, SH

Pembina

NIP. 196704301992051001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKIB
JABATAN KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

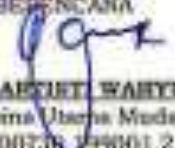
NO	SASARAN STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	2	3	4
1	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,60
		Persentase Kepemertaan KB Aktif	75,80
		Persentase Kesiertaan KB MKJP	46,15
		Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	45,45
		Terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas	45,45%
		Terselenggaranya penugasan direktif pimpinan	12 kegiatan
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000	DAK NON FISIK
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10.000.000	DAU
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Barisan Pemunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.300.000	DAK NON FISIK
	Peningkatan Kesiertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.063.307.000	DAK NON FISIK
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.150.000	DAK NON FISIK

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.176.840.000	DAK NON FISIK
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	274.500.000	DAK NON FISIK
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga	275.500.000	DAK NON FISIK
	Jumlah	4.987.397.000	

Temanggung, 13 Januari 2025

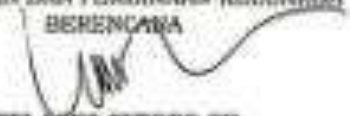
Pihak Kedua

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA


Dena GEMA ARIYATI WAHYUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19700730 199001 2 000

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA


TRI AGUS SUTOPU
Pembina
NIP. 19681023 199401 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telepon/Faksimili (0293) 491059
surel elektronik: dppppkb@temanggungkab.go.id laman: dppppkb.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDZA FATRIAH IZZUDIN DON, SH, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PPPAPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197007301980012002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA

IDZA FATRIAH IZZUDIN DON, SH, MM
Pembina
NIP. 196901291987032004

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH PPPAPKKB
JABATAN KARD KETAHANAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJANTERA

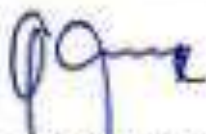
NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Persentase Desa / kampung yang memiliki Data NIKD Keluarga	100%
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,80%
		Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	1,5%
		Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	11,6%
2	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	2 laporan
3	Terselesaikannya program direktif pimpinan	Terlaksananya penugasan direktif pimpinan dengan penuh tanggung jawab	12 kegiatan
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
	Pemetaan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	216.000.000,00	DAK Non Fisik BOKB-KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Budget Bersama melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (RakorDes), dan Mini lokakarya (Minilok)	400.000.000	DAK Non Fisik BOKB-KB
	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000	DAK Non Fisik BOKB-KB

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEKANTERA (KS)	4.958.200.000	DAU dan DAK Non Fisik BOKH-KB
	Jumlah	5.352.000.000	

Temanggung, 13 Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Dr. GEMA ARDIATI WAHYUDI, MM

Pesbina Utama Muda

NIP. 19700730 199001 2 002

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN PENINGKATAN KELUARGA



IDA PATRIANI IZZUDIN DOK, SH, MM

Pesbina

NIP. 19690125 199703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(Jl. Jendral Sudirman No. 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faksimil (0293)
491059 Fax. 492182 Kode Pos 56218
Surel elektronik dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHABIB MUALIM, SKM, M Kes, MM

Jabatan : Pj. KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Jabatan : KEPALA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DPPPAPPKB

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197007301999012002

Pihak Pertama,
Pj. KABID PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

KHABIB MUALIM, SKM, M Kes, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196804251988021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN PTL. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

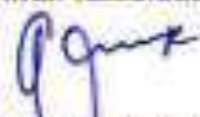
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ketenakalan perempuan di lembaga pemerintah Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan kerja PD	2,35% 100%
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,005 0,003
3	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	62,63% 100%
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Kelengkapan Layak Anak	702 (Nilai Kategori Nindya)
5	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,011
6	Terselesainya penugasan direktif pimpinan	Tertindakannya penugasan direktif pimpinan dengan penuh tanggung jawab	12 kegiatan
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	35.000.000	DAU
2	Program Perlindungan Perempuan	42.842.200	DAU
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	25.000.000	DAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	45.000.000	DAU
5	Program Pemenuhan Khusus Anak	35.000.000	DAU
Jumlah		182.842.200	

Temanggung, 13 Januari 2025

Plhak Kedua

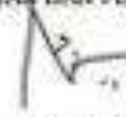
KEPALA DPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISRI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700730 199001 2 002

Plhak Pertama

PL. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KHABIR MUALIM, SHM, M.Hes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680425 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jln. Jendral Sudirman No. 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faksimil (0293)
491059 Fax. 492182 Kode Pos 56218
Surel elektronik: dppppgkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. PURWANINGSIH

Jabatan : PIKASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHABIB MUALIM, SKM, MKes, MM

Jabatan : SEKRETARIS DPPPPAPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DPPPPAPKB

KHABIB MUALIM, SKM, MKes, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196804251988021001

Pihak Pertama,
PIKASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Dra. PURWANINGSIH

Penata TK I

NIP. 19680923 199402 2 001

**PELAKSIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPTTAPPSB
JABATAN PL. KASUBAG UMUM DAN KEPDAGAWAAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya pengelolan administrasi kepegawaian	Persentase pengelolan administrasi kepegawaian	100%
2	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolan keuangan perangkat daerah	100%
3	Terkelolanya barang Milik Daerah	Persentase pengelolan barang Milik Daerah	100%
4	Terpenuhinya kebutuhan umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%
5	Terselenggaranya pelayanan direktif pimpinan dengan penuh tanggung jawab	Terselenggaranya pelayanan direktif pimpinan	3 kegiatan
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Temanggung, 13 Januari 2025

Plhak Kedua
SEKRETARI DPTTAPPSB KAB TMG

SHARIF HUALIM, SKM, M. Kes, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19680425-198802 1 001

Plhak Pertama
PL. KASUBAG UMUM DAN KEPDAGAWAAN

Sta. PURNANINGRUM

Pembina Tk. I
NIP. 19680923 199402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jln. Jendral Sudirman No. 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faxmil (0293)
492059 Fax. 492182 Kode Pos 56218
Surel elektronik: dppppkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. PURWANINGSIH

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHABIB MUALIM, SKM, MKes, MM

Jabatan : SEKRETARIS DPPPAPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

SEKRETARIS DPPPAPKB

KHABIB MUALIM, SKM, MKes, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196804251988021001

Pihak Pertama,

KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

Dra. PURWANINGSIH

Penata TK I

NIP. 19680923 199402 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPTTAPPRB
JABATAN KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan PD serta program penunjang urusan pmda dan administrasi keuangan	Terpenuhiya dokumen perencanaan	14 Dokumen
		Terselenggaranya dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen
		Terpenuhiya laporan DAK	6 Dokumen
		Terpenuhiya administrasi pengadaan barang dan jasa	12 Dokumen
		Terpenuhiya laporan keuangan	100%
		Terpenuhiya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Dokumen
2	Terealisasiannya penguasaan direktif pimpinan dengan penuh tanggung jawab	Jumlah penguasaan direktif pimpinan	12 kegiatan
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Temanggung, 13 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARI DPTTAPPRB KAB TMG

KHARIS MUJALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680425 198802 1 001

Pihak Pertama
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Drs. PURWANTOSIH
Penata Tk. I
NIP. 19680923 199402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. Jendral Sudirman No. 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faxmil (0293)
491059 Fax. 492102 Kode Pos 56218
Surat elektronik: dppppkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. SUDIYATI WAHYUNINGSIH

Jabatan : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI AGUS SUTOPO, SH

Jabatan : KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KB

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KB

TRI AGUS SUTOPO, SH

Pembina

NIP.197007301998012002

Pihak Pertama,

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB
MUDA

Dra. SUDIYATI WAHYUNINGSIH

Penata TK I

NIP.19671204 99203 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA**

NO	SASARAN STRATEGI SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya data Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,60%
	Tersedianya angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)/Persentase kepesertaan KB aktif	Persentase kepesertaan KB Aktif (mCPR)	77,89%
		Terlaksananya penggerakan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan KB	11 Kegiatan
2	Tersedianya data Kesertaan KB MKJP	Persentase akseptor menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	46,15%
		Jumlah Pembinaan Pelayanan Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9 kegiatan
3	Terlaksananya petugasan direktif pimpinan	Jumlah petugasan direktif pimpinan	2 kegiatan
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.863.307.000	DAK Non Fisik BOKB-KB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.150.000	DAK Non Fisik BOKB-KB
	Jumlah	2.893.457.000	

Temanggung, 13 Januari 2025
Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

IRLAGE SUTOPORUH
Pembina
NIP. 19670430 199205 1 001

Pihak Pertama
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA MUDA

Dra. SUDYATI WAHYUNINGSIH
Penata Tk. I
NIP. 19671204 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jln. Jendral Sudirman No. 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56210 Telp/Faksimil (0293)
491059 Fax. 492182 Kode Pos 56210
Surel elektronik dppppplb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSAENI WIDODO YUNianto, SH

Jabatan : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI AGUS SUTOPO, SH

Jabatan : KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KB

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KB

TRI AGUS SUTOPO, SH

Pembina

NIP. 197007301999012002

Pihak Pertama,

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB
MUDA

KUSAENI WIDODO YUNianto, SH

Penata TK I

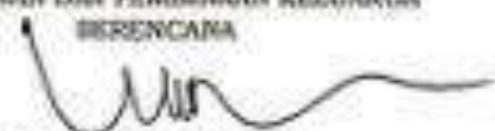
NIP. 19760809 200801 1 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPTAPKKB
JABATAN PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

NO	SASARAN STRATEGI SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya angka prevaleansi kontrasepsi modern/modern contraceptive	Jumlah kader yang melaksanakan peran institusi Masyarakat Pedesaan	1926 Kader
2	Tersedianya data Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kader IMP Jumlah laporan kegiatan KKB tentang Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	6 kegiatan 6 laporan
3	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader IMP yang melaksanakan penyuluhan program hingga keencana Jumlah laporan Pembinaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1926 Kader 12 laporan
4	Terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang terbentuk Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas berkembang Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas mandiri Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas berkelanjutan Jumlah Kampung KB yang melaksanakan DANESAT Jumlah laporan kegiatan pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas	45,45% (131 Desa/Kelurahan) 28 Desa/Kelurahan 13 Desa/Kelurahan 27 Desa/Kelurahan 68 Desa/Kelurahan 12 Laporan
5	Terselenggaranya penugasan direktif pimpinan	Jumlah penugasan direktif pimpinan	2 kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (MP)	3.175.840.000	DAK Non Fisik BOKB-KB
3	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesenitatan Ber-KB		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kemana di Kampung Keluarga Berkualitas	274.400.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga	275.000.000	
	Jumlah	3.726.240.000	

Temanggung, 13 Januari 2025
 Pihak Kedua
 KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
 PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA
 BERENCANA


TRI AGUS SUTOPO, SH

Pembina
 NIP. 19670430 199205 1 001

Pihak Pertama
 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA AHLI MUDA


KUSAENI WIDODO YUANTIANTO, SH

Penata Tk. I
 NIP. 19760600 200801 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jln. Jendral Sudirman No. 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faksimil (0293)
491059 Fax. 492102 Kode Pos 56218
Surat elektronik: dppppkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ETY PRASETYOWATI, S.H

Jabatan : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IDZA FATRIAH IZZUDIN, DON SH.MM

Jabatan : KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENINGKATAN KS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

KABID PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA

IDZA FATRIAH IZZUDIN, DON SH.MM

Pembina

NIP. 19690129 199703 2 004

Pihak Pertama,

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB
MUDA

ETY PRASETYOWATI, S.H

Penata TK I

NIP. 19681023 199401 2 002

PERJASJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKED
JABATAN PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

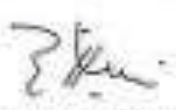
NO	SASARAN STRATEGI SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEUATAN	TARGET
1	2	3	4
	Terbentuknya rumah data kependudukan di desa/kelurahan	Jumlah rumah data kependudukan di desa/kelurahan	40 desa/kelurahan
	Tersedianya data pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	12 dokumen 8,80%
	Tersedianya data Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Jumlah organisasi yang mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Penderewasaan Usia Perkawinan Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan	14 organisasi 11 sekolah
	Tersedianya angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)	Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 th (ASFR 15-19 th)	11,60%
	Tersedianya data Indeks Pembangunan Keluarga	Jumlah organisasi yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga	14 organisasi
	Terselenggaranya penugasan direktif pimpinan	Jumlah penugasan direktif pimpinan	2 kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
a	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000	DAK Non Fisik BOSB-KB
c	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	210.000.000	PAD dan DAK Non Fisik BOSB-KB
2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
d	Advokasi Program KKHPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	230.000.000	DAK Non Fisik BOSB-KB
	Jumlah	683.800.000	

Temanggung, 13 Januari 2025
 Pihak Kedua
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN PEMINGKATAN
 KELUARGA


IDA PATRIA IZZUDIN, DON S.H.MM
 Pembina
 NIP. 19690129 199703 2 004

Pihak Pertama
 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA AHLI MUDA


ETY PRASETYOWATI, S.H
 Penata Tk. 1
 NIP. 19681023 199401 2 002



PENERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Jendral Sudirman No. 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telp/Faximil (0293)
491059 Fax. 492182 Kode Pos 56218
Surat elektronik: dppgppkb@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra MIRA HARSIM,

Jabatan : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IDZA FATRIAH IZZUDIN, DON SH.MM

Jabatan : KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

KABID PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA

IDZA FATRIAH IZZUDIN DON SH.MM

Pembina

NIP. 19690129 199703 2 004

Pihak Pertama,

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB
MUDA

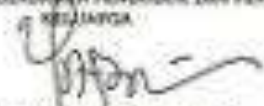
Dra MIRA HARSIM

Penata TK I

NIP. 19670926 199302 2 002

PELAKSIAN KEMERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH OFFPAPROS
JABATAN PENYATA KEPENDUDAHAN DAN SD MUDA

NO	SASARAN STRATEGI SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SARJIT
1	2	3	4
	Terselenggaranya data intake pembangunan keluarga	Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan arahan kelompok keluarga (KKK, KKK, KKK, PPK, PPK dan PPK)	11 laporan
		Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan arahan keluarga	8 laporan
		Jumlah laporan evaluasi pendampingan oleh TPA (Tim Pendamping Keluarga) dalam upaya pembinaan keluarga	11 laporan
	Terselenggaranya program difasilitasi program	Jumlah laporan pembinaan intake pembangunan keluarga (PPK)	4 laporan
		Jumlah program difasilitasi program	2 laporan
20	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Pembangunan Timaga Pengeruk KIP/Program Lapangan KIP (PKS/PLKS)		
	Penggunaan Kader Institut Masyarakat Pedagogik (IMP)	2.175.340.000	DAK Non Pajak B040 KB
3	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan tetangga dan keluarga		
	Penyusunan dan pelaksanaan kelompok kegiatan pembinaan dan pembinaan keluarga (KKK, KKK, PPK, PPK dan Uluha, pembinaan pembangunan keluarga dengan JETPA)	35.000.000	DAU
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peningkatan Serta orisinal Kemasyarakatan Tingkat Keluarga/Keluarga/Tim dalam pembangunan keluarga/pembinaan tetangga dan pembinaan keluarga		
3	Pembinaan Data dan Informasi Keluarga Berbasis Statistik (Pembinaan rumah Calon Pengusaha/Calon PUS, Ibu Hamil, Tawar selis/kelelahan, Bedah/Bedah)	1.827.000.000	DAK Non Pajak B040 KB
	Pembinaan keluarga Berbasis Statistik (Pembinaan rumah Calon Pengusaha/Calon PUS, Ibu Hamil, Tawar selis/kelelahan, Bedah/Bedah)	2.192.400.000	DAK Non Pajak B040 KB
	Jumlah	6.372.740.000	

Terbilang, 12 Januari 2023
 Pihak Kedua
 KEPALA BIDANG KEPENDUDAHAN PENDUKUNG DAN PERINGKATAN
 KEMERJA

DINA FATMA IZZUDIN, S.Pd, S.H., M.H.
 Kepala
 NIP.19690220 199703 2 004

Pihak Pertama
 PENYATA KEPENDUDAHAN DAN KELUARGA
 BERENCANA AKRI MUDA

DINA NURA HARROZI
 Penata Tk. I
 NIP.19670926 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218 Telepon/Faksimil (0293) 491059
surel elektronik: dppppkb@temanggungkab.go.id laman: dppppkb.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RORO RITA SAPTA WATI, SH, MM
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Jabatan : Pk. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pk. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 198804251988021001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

RORO RITA SAPTA WATI, SH, MM
Pembina
NIP. 196708231967032004

**PERJANJIAN KIBERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPPPAPPHB
JABATAN ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Jumlah Kegiatan pada Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Advokasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender bagi	2 laporan
		Jumlah Kegiatan dalam APBD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender	103 kegiatan
		Jumlah Laporan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Responsif Gender	46 laporan
2	Meningkatkan Nilai Kategori Kabupaten Layak Anak	Jumlah Nilai Kabupaten Layak Anak	702 (Nilai Kategori Nindya)
		Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	10 layanan
3	Menurunkan kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi dan advokasi pencegahan Kekerasan Terhadap	2 laporan
		Jumlah anak yang memperoleh advokasi dan pendampingan pencegahan kekerasan	420 anak
		Jumlah AMPE (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) yang mendapatkan	25 anak
4	Terlaksananya kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan	Jumlah laporan analisis dan advokasi kebijakan	1 laporan
5	Terselesaikannya penugasan direktif pimpinan	Jumlah penugasan direktif pimpinan	2 kegiatan

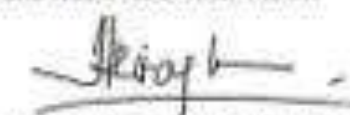
NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRO	10.000.000	DAU
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup kewenangan kabupaten/kota		
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak kewenangan kabupaten/kota	45.000.000	DAU
3	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kewenangan kabupaten/kota		
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program kegiatan pencegahan KTA	10.000.000	DAU
4	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	DAU
Jumlah		90.000.000	

Temanggung, 13 Januari 2025

Pihak Kedua
 PL. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK


 KHABIB HUALIN, SKM, M.Kes, NIM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680425 198802 1 001

Pihak Pertama
 ANALIS KEBIJAKAN AKSI MUDA


 BORO RITA SAPTA WATI, SE, NM
 Pembina
 NIP. 19670923 198703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56218

Telepon (0293) 491059, Faksimile (0293) 491059

Laman : dpppappkb.temanggungkab.go.id Pos-el : dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M

Jabatan : KEPALA DPPPAPPKB

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETYAWAN, SE

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN,SE

Pihak Pertama,
KEPALA DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP . 1970073019900 2002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DPPAPPKB
JABATAN KEPALA DPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga	Indek Ketimpangan Gender	0,21
		Indek Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	63,98

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesetaraan Gender	Indek Pemberdayaan Gender	74,31
2	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	100
3	Mewujudkan Keluarga Berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,79
		Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per 1000 WUS usia 15-49 tahun	2,18
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,65
		Nilai IKM Perangkat Daerah	85,20

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.230.485.522	DAU
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	25.100.000	DAU
3	Program Perlindungan Perempuan	38.394.370	DAU
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18.959.200	DAU
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	40.335.500	
6	Program Pemenuhan Khusus Anak	88.368.600	DAU
7	Program Pengendalian Penduduk	493.800.000	DAK
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.470.149.000	DAU DAN DAK
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.249.055.050	DAU dan DAK
	JUMLAH	16.654.647.242	

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
BUPATI TEMANGGUNG



AGUS SETYAWAN, SE

Pihak Pertama
KEPALA DPPPAPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700730 199001 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56216
Telepon (0293) 491059, Faksimile (0293) 491059
Laman : dpppappkb.temanggungkab.go.id Pos-el : dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM.

Jabatan : SEKRETARIS DPPPAPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M.

Jabatan : KEPALA DPPPAPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
KEPALA DPPPAPKB

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.197007301999012002

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPPPAPKB

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM.
Pembina Tingkat I
NIP.196804251988021001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN SEKRETARIS DPPPAPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Administrasi umum dan administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi umum dan administrasi Kepegawaian	100%
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaporan dan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan penunjang perangkat daerah	Persentase kebutuhan umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%
3	Terselesainya penugasan direktif pimpinan	Terlaksananya penugasan direktif pimpinan dengan penuh tanggung jawab	100%

NO		ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.230.485.522	DAU
	JUMLAH	4.230.485.522	

Temanggung, 1 Oktober 2025
 Pihak Kedua
 KEPALA DPPPAPKB KAB TMG

 Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700730 199001 2 002

Pihak Pertama
 SEKRETARIS DPPPAPKB KAB TMG

 KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680425 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56218
Telepon (0293) 491059, Faksimile (0293) 491059
Laman : dpppappkb.temanggungkab.go.id Pos-el : dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMAD CHOTIM, SKM, MM

Jabatan : KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Jabatan : KEPALA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

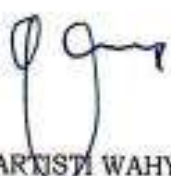
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DPPPAPPKB

Pihak Pertama,
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA


Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.197007301999012002


MUCHAMAD CHOTIM, SKM, MM
Pembina
NIP. 19710803 199403 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPTPPPKB
JABATAN KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	46,7
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	77,7
		Persentase KB pasca persalinan	57,4
		Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	15,22
	Terselesaikannya penugasan direktif pimpinan	Jumlah penugasan direktif pimpinan	2 kegiatan
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.470.149.000	DAK dan Dau
	JUMLAH	7.470.149.000	

Temanggung, 3 NOVEMBER 2025
 Pihak Kedua

KEPALA DPTPPPKB
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700730 199001 2 002

Pihak Pertama
 KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
 DAN PEMBINAAN KB

MUCHAMAD FOTIM,SKM, MM
 Pembina
 NIP.19710803 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56218
Telepon (0293) 491059, Faksimile (0293) 491059
Laman : dppppppkb.temanggungekab.go.id Pos-el : dppppppkb@temanggungekab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOWILATUN UMURIYAH, SE.,MM

Jabatan : KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Jabatan : KEPALA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DPPPAPPKB

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.197007301999012002

Pihak Pertama,
KABID PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

TOWILATUN UMURIYAH SE.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 197111091993112001

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKKB
JABATAN KADIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase AIG pada bidang bidang APED	9,21
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,3
1	Memastikan ketahanan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	100
		Rasio ketahanan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5,39
2	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung ketahanan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan rumah anak di pemerintah	69,33
3	Tercapainya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Kebijakan Layak Anak	melaju
		Persentase terbitnya SKPPA	2,47
4	Meningkatnya pengujian dan pengawasan index ketahanan eksploitasi, penyalahgunaan, perkawinan dan pernikahan selah lainnya terhadap anak	Index Perlindungan Anak	62,2
		Persentase pernikahan usia anak	0,106
		Persentase kasus ketahanan anak yang melapor dan ditangani	100
		Rasio kasus ketahanan terhadap anak	8,93
5	Tercapainya pelaksanaan direktif perempuan	Terlaksananya pelaksanaan direktif perempuan dengan penuh tanggung jawab	12 logistik
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	25.100.000	DAU
2	Program Perlindungan Perempuan	38.394.370	DAU
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18.959.200	DAU
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	40.335.500	DAU
5	Program Pemenuhan Khusus Anak	88.369.400	DAU
		211.158.470	

Temanggung, 1 Oktober 2025
 Pihak Kedua
 KEPALA DPPPAPKKB
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. GEMA ARIESTI MAHYUDI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197007301990012000

Pihak Pertama
 KADIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK

YOWILATUS USURIJAH, SS, MM
 Kepala Bidang
 NIP. 197111091993112001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56218
Telepon (0293) 491059, Faksimile (0293) 491059
Laman : dpppppkb.temangungkab.go.id Pos-el : dpppppkb@temangungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDZA PATRIA IZZUDIN DON, SH, MM

Jabatan : KABID DALDUK DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Jabatan : KEPALA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
KEPALA DPPPAPPKB

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.197007301999012002

Pihak Pertama,
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN
PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA

IDZA PATRIA IZZUDIN DON, SH, MM.
Pembina
NIP . 19690129 199703 2 004

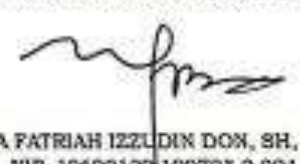
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPPPAPKB
JABATAN KABID KETAHANAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	58,70
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	7,89
		Median usia kawin pertama (MU/KP)	19,9
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	9,32
2	meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga bajita	45,56
		Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	87,30
		Indeks lansia berdaya	57,90
3	Terselesainya penugasan direktif pimpinan	Terlaksananya penugasan direktif pimpinan dengan penuh tanggung jawab	12 kegiatan
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Pengendalian Penduduk	493.800.000	DAK
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	7.470.149.000	DAU dan DAK
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.249.053.450	DAU dan DAK
Jumlah		11.719.202.450	

Pihak Kedua
 KEPALA DPPPAPKB KABUPATEN


 Dra. GEMA ARISTI WAHYUDI, MM
 Pembina Usaha Muda
 NIP. 19700730 199001 2 002

Temanggung, 1 Oktober 2025
 Pihak Pertama
 KABID KETAHANAN KELUARGA DAN


 IDZA PATRIAH IZZUDIN DON, SH, MM.
 NIP. 19690129 199703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56218
Telepon (0293) 491059, Faksimile (0293) 491059
Laman : dpppappkb.temanggungkab.go.id Pos-el : dpppappkb@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. PURWANINGSIH

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM.

Jabatan : SEKRETARIS DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

SEKRETARIS DPPPAPPKB

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 196804251988021001

Pihak Pertama,

KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

Dra. PURWANINGSIH
Penata TK I
NIP. 19680923 199402 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPPAPPKB
JABATAN KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO	SASARAN KEOLATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya perencanaan dan pelaporan PD serta program penunjang urusan penda dan administrasi keuangan	Penyusunan dokumen perencanaan	14 Dokumen
		Penyusunan laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen
		Penyusunan dokumen pelaporan	6 Dokumen
		Penyusunan dokumen keuangan	12 Dokumen
		Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	1
		Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Dokumen
2	Terselesainya penugasan direktif pimpinan dengan penuh tanggung jawab	Terselesainya penugasan direktif pimpinan	2 kegiatan
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Pihak Kedua
SEKRETARIS DPPAPPKB KAB TMG

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19580425 198802 1 001

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN


Dra. PURWANINGSIH
Penata Tk. I
NIP. 19680923 199402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56218
Telepon (0293) 491059, Faksimile (0293) 491059
Laman : dppppkkb.temanggungkab.go.id Pos-el : dppppkkb@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSAENI WIDODO YUNianto,SH

Jabatan : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUCHAMAD CHOTIM,SKM, MM

Jabatan : KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 November 2025

Pihak Kedua
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA

MUCHAMAD CHOTIM,SKM, MM
Pembina
NIP.197108031994031005

Pihak Pertama,
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB
MUDA

KUSAENI WIDODO YUNianto,SH
Penata TK I
NIP.197606092008011007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DPPPAKKB
JABATAN PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB AHLI MUDA

NO	SABARAN STRATEGI SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Pengembangan aspek pendirian kelompok ekonomi berbasis komunitas (KUB) dan Terwujudnya kemandirian KUB desa	Jumlah kader yang melaksanakan peran Institut Masyarakat Pedesaan Jumlah laporan kegiatan KUB, termasuk Peningkatan Usaha Sehari (PUS) yang dilaksanakan kelompok	100 Kader 5 laporan
2	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader IMP yang melaksanakan pendirian program bangga ketahanan Jumlah laporan Pembinaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Kader 12 laporan
3	Terwujudnya Kampung Keluarga Berkualitas mandiri	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas mandiri Jumlah Desa yang KB yang melaksanakan DASHAT Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas	45 Kampung KB 66 Desa Berkualitas 66 Desa Berkualitas
5	Terseleksiannya paguyuban direktif pimpinan	Jumlah paguyuban direktif pimpinan	2 kegiatan
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
	Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.176.840.000	DAR Non Fisik DOKB-KB
3	Pembudayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber- KB		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Ketahanan di Kampung Keluarga Berkualitas	374.400.000	
	Fasilitasi Pengelolaan dapur Sehat Anak Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga	275.000.000	
	Jumlah	2.726.240.000	

Terngungu, 3 November 2025
Bhak Kerdun

KARIR PENGOBLOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KE

MELCHAMAD, CHOTIM, 8KM, NM
NP.19710800199403 1-003

Pihak Pertama
 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KEMASYARAKATAN
 KOTA MALANG

KUSAKENI WIDODO YUNANTO, SH
NIP. 19760609 200801 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56218
Telepon (0293) 491059, Faksimile (0293) 491059
Laman : dppappkb.temanggungkab.go.id E-mail : dppcepsi@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. SUDIYATI WAHYUNINGSIH

Jabatan : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUCHAMAD CHOTIM, SKM, MM

Jabatan : KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 3 November 2025

Pihak Kedua
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA

MUCHAMAD CHOTIM, SKM, MM
Pembina
NIP.19710803.199403.1.005

Pihak Pertama,
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB
MUDA

Dra. SUDIYATI WAHYUNINGSIH
Penata TK I
NIP. 19671204.199203.2.004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DITPAPEK
JABATAN PESAKA KEPENDUDUKAN DAN KB AHLI PERTAMA**

NO	SASARAN STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terselenggaranya data Kesiapan KB MKIP dan Peserta KB Aktif	Persentase ketercapaian pelaksanaan metode kontrasepsi jangka panjang	45,7
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern kontraceptif (m-PP)	77,7
		Persentase KB pasca pelaksanaan	57,4
		Jumlah kegiatan pelayanan dalam rumus strategi	15 rumus strategi
		Jumlah kegiatan pelayanan	2 kegiatan
	Terselenggaranya program diseminasi program	Jumlah program diseminasi program	2 kegiatan
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kesiapan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	206.330.700,00	DAX Non Pihak BOKB-PB
	Peningkatan Kesiapan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (MKJP)	30.150.000,00	DAX Non Pihak BOKB-PB
	Jumlah	2.093.487.000,00	

Ternagapung, 8 November 2023
Pihak Kedua
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN PEMERIKSAAN KB

MUCHAMAD CHAHLIN, S.KM, MM
NIP.197108031954031005

Pihak Pertama
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB AHLI PERTAMA

Des. BUDYATI WAHYUNINGRUM
NIP. 19671204 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56218
Telepon (0293) 491059, Faksimile (0293) 491059
Laman : dpppppkb.temangungkab.go.id Pos-el : dpppppkb@temangungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ETY PRASETYOWATI, S.H

Jabatan : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IDZA PATRIAH IZZUDIN DON, SH. MM

Jabatan : KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENINGKATAN KS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka penghargaan dan saksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

KABID PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA

IDZA PATRIAH IZZUDIN DON, SH.MM
Pembina
NIP. 19690129 199703 2 004

Pihak Pertama,

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB
MUDA

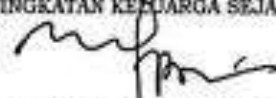
ETY PRASETYOWATI, S.H
Penata TK I
NIP. 196810231994012002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH DPPPAPPR
JABATAN PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA**

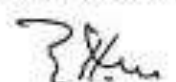
NO	SASARAN STRATEGI SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Terbentuknya rumah data kependudukan di desa/kelurahan	Jumlah rumah data kependudukan di desa/kelurahan	68 desa/kelurahan
2	Tersedianya data indek pembangunan berwawasan Keluarga (IPBK)	Indek Pembangunan berwawasan Keluarga (IPBK)	58,7
3	Tersedianya data pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	12 dokumen 7,59
4	Tersedia data Median usia kawin	Median usia kawin pertama (MUKEP) Jumlah Sekolah Slaga Kependudukan	19,9 11 sekolah
5	Tersedianya angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)	Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 th (ASFR 15-19 th)	11,60%
6	Tersedianya data Indeks Pembangunan Keluarga	Jumlah organisasi yang mendapatkan Advokasi Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Keluarga Terselenggaranya penugasan direktif pimpinan	 organisasi 62.....% Jumlah penugasan direktif pimpinan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
a	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000	DAK Non Fisik BOKB-KB
b	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	216.000.000	PAD dan DAK Non Fisik BOKB-KB
2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
a	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000	DAK Non Fisik BOKB-KB
	Jumlah	683.800.000	

Pihak Kedua
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA


IDZA PATRIA IZZUDIN DON, SH. MM.
NIP.19690129 199703 2 004

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA


ETY PRASETYOWATI, S.H
NIP. 19681023 199401 2 002

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	SABARAN	TARGET KINERJA SABARAN (N)				PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA ANBI	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11												12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penyakit dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

JARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)				PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN		
	I	II	III	IV								I	II	III	IV											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	3				4	5	6	7	8	9	10	11												12		
	50	50			Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan	2 organisasi	Facilitasi pemilihan duta Genre (kegiatan pembinaan etik dan persiapan pidugan)	terlaksananya Pembekalan Materi bangsa kencana untuk Forgen dan Seka Kencana	pengutasaan dan pemahaman materi bangsa kencana lebih meningkat																
									Terlaksananya Pemilihan Duta Genre tahun 2026	Terpilihnya duta genre tahun 2026																

Temanggung, Januari 2026



RENCANA KINERJA TAHUNAN
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung

TAHUN : 2027

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, serta Keluarga	Indek Ketimpangan Gender	0,191
		Indek Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	65,6
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesetaraan Gender	Indek Pemberdayaan Gender	74,5
2	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	100
3	Mewujudkan Keluarga Berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,77
		Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	2,16
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,7
		Nilai IKM Perangkat Daerah	85,76

Temanggung, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS DPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG

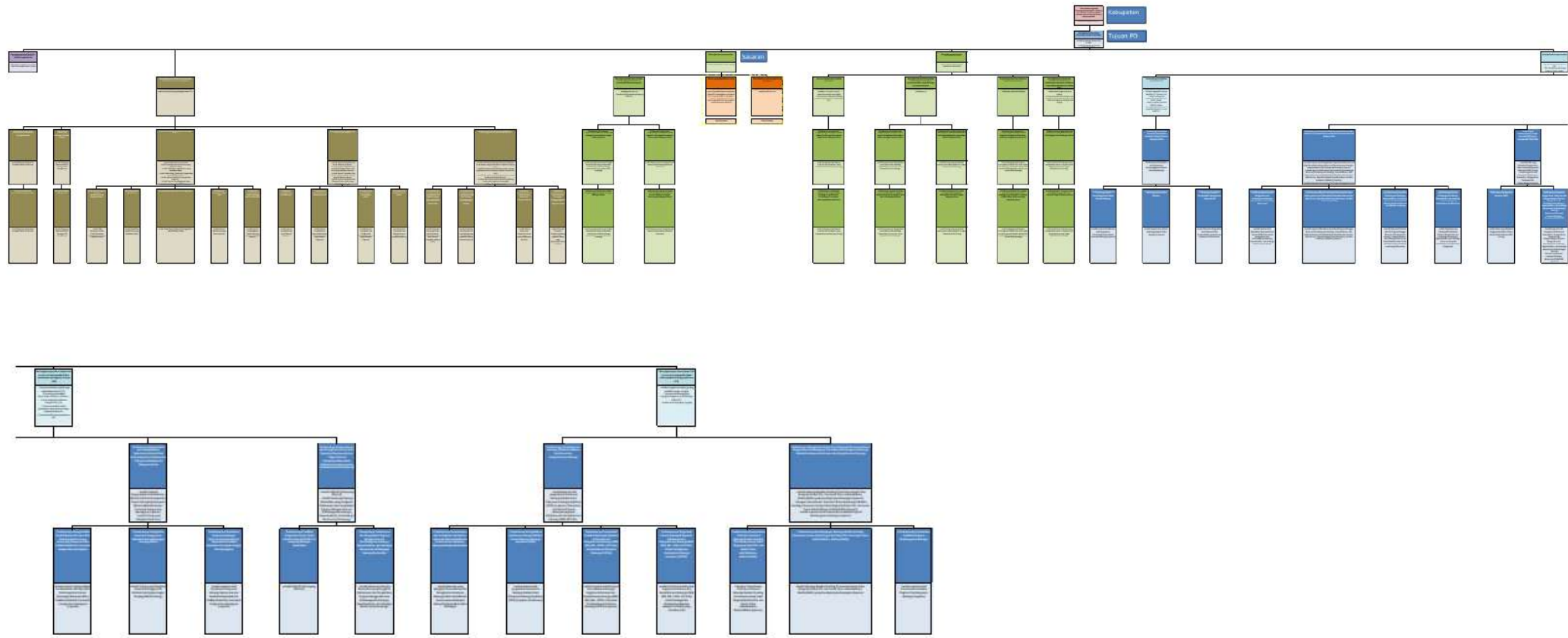
Dr. Gema Wati Wanyudi, M.M.

Panglima Utama Muda

NIP. 197005301990012002



Pokin DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui link: <https://bit.ly/Pokin2530>



[illegible]

IKPD TW4 DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui link: <https://bit.ly/IKPDTW4-DPPPAPPKB>

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG
S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DPPKBPPPA

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2024	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW IV 2025
						2025	2026	2025	
		INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)							
		1	Indeks Pembangunan Gender	angka	96,27	96,78	97,13	96,27	99,47
		2	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,22	0,21	0,201	0,22	100,00
		3	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,28	74,31	74,35	74,28	99,96
		4	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	Persen	n.a	100	100	100	100,00
			Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani					26	
			Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor					26	
		JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)			%	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD			99,86
		A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)							
		1	Nilai AKIP Perangkat Daerah		67,3	71,65	71,66	71,65	100,00
		2	Nilai IKM Perangkat Daerah		85,18	85,20	85,45	85,29	100,00
		1	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,22	0,21	0,201	0,22	100,00
		2	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,28	74,31	74,35	74,28	99,96
		3	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100,00
			jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani					26	
			jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor					26	
		INDIKATOR PROGRAM							
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
			Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						

	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,22	9,21	9,7	9,90	100,00
			jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD					72.288.109.024	
			jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD					730.207.882.997	
		2	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,27	2,3	2,35	3,02	100,00
			Jumlah perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah					6665	
			jumlah angkatan kerja perempuan					220519	
			Program Perlindungan Perempuan						
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	3	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	100	100	100	100,00
			jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani					22	
			jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor					22	
		4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	5,6	5,39	5,15	5,3790	99,80
			jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan					22	
			jumlah penduduk perempuan					408996	
			Program Peningkatan kualitas Keluarga						
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	5	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	65,38	69,23	73,08	65,38	94,45
			jumlah puskesmas yang memenuhi kriteria ramah anak					17	
			jumlah puskesmas					26	
	Program Pemenuhan Hak Anak		Program Pemenuhan Hak Anak						

		1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,8	0,79	0,78	0,77	100,00
			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
		2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	63,17	63,98	64,79	63,17	98,73
		3	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Angka	2,19	2,18	2,17	1,24	100,00
		JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)			3	Jumlah Data Capaian Indikator			99,58
		INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)							
		Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
		1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	63,17	63,98	64,79	63,17	98,73
		2	TFR (<i>Total Fertility Rate</i> / Angka Kelahiran Total)	angka	2,19	2,18	2,17	1,24	100,00
		3	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,8	0,79	0,78	0,77	100,00
		INDIKATOR PROGRAM							
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
		Program Pengendalian Penduduk							
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,6	58,7	58,8	60,1	100,00
		2	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	7,6	7,59	7,58	7,44	97,97
			Jumlah perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi					9049	
			jumlah PUS					121.698	
		3	Median usia kawin pertama (MUKP)	angka	19,8	19,9	20,1	22	100,00
		4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesifik fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	%	9,48	9,32	9,22	4,01	100,00
			Jumlah kelahiran dari wanita usia remaja (15-19 tahun)		249			125	
			jumlah wanita usia 15-19 tahun		26260			31134	
		Program Pembinaan KB							

	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	5	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,45	46,7	46,95	48,68	100,00
			Jumlah Peserta KB aktif MKJP					48902	
			Jumlah Peserta KB					100451	
		6	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	77,5	7,77	77,8	82,54	100,00
			Jumlah peserta KB aktif					100.451	
			Jumlah Pus					121.698	
		7	Persentase KB pasca persalinan	%	52,42	57,4	59,9	52,09	90,75
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang Menggunakan Alat Kontrasepsi					3751	
			jumlah PUS Yang baru melahirkan					7201	
		8	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	14,88	15,22	15,91	15,57	100,00
			jumlah seluruh kampung berkualitas dengan kategori mandiri					45	
			jumlah kampung KB					289	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
	meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	9	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,53	45,56	45,75	50,23	100,00
			jumlah seluruh keluarga yang menjadi anggota BKB					12721	
			jumlah seluruhsasaran BKB					25325	
		10	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,23	87,3	87,4	87,23	99,92
		11	Indeks lansia berdaya	angka	57,83	57,9	58	57,83	99,88
		JUMLAH IKUPD		3	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD				99,58
		JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		11	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM				98,96
		DAN KELUARGA BERENCANA		14	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PENGENDERAHAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				99,27
		JUMLAH TOTAL IKUPD		8	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD				99,78
		JUMLAH TOTAL INDIKATOR PROGRAM		22	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM				98,60
		JUMLAH TOTAL INDIKATOR DINAS PPKBPPA		30	RATA-RATA CAPAIAN DINAS PPKBPPA				99,19

Kriteria Penilaian Realisasi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Status
$91\% \leq 100\%$
$76\% \leq 90\%$
$66\% \leq 75\%$
$51\% \leq 65\%$
$\leq 50\%$

Temanggung, Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung,



Dra. Gema Aftisti Wahyudi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197007301990012002

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 s.d TW IV
DPPPAPOKB
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

1. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
2. Semakin bertambah panjangnya jalan, jembatan, jaringan irigasi baru;
3. Meningkatkan nilai konstruksi pada jalan, jembatan dan prasarana jaringan irigasi menjadi lebih baik;
4. Pemeliharaan secara terencana dan rutin infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi;
5. Penyediaan prasarana pelengkap pada infrastruktur jalan, jembatan dan sarana jaringan irigasi serta pendanaan pengelolaan jaringan irigasi;
6. Pemanfaatan sarana pendukung secara efisien dan efektif lewat pemeliharaan secara terencana dan rutin;
7. Tertingkatnya mutu infrastruktur sesuai dengan perkembangan teknologi;
8. Terwujudnya lingkungan perumahan yang sehat dan teratur;
9. Peningkatan kualitas pengelola infrastruktur;

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2024 (Revisi 2023)		Realisasi s.d 2023		Target 2025		Realisasi s.d 2024								Target 2025		Realisasi s.d 2024		Target 2025		Cat		
				1	2	3	4	5	2024				2025				2024		2025							
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100			9.880.558.883		9.879.448.471	9.289.483.523	3,6		1.144.148.899	12	1.034.738.518	12	176.108.769	12	916.881.803	13	6.017.098.177	13		9.983.588.589		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawain	%	100	31.386.117.212																					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	7	1.000,00	3	-	3	-	0	-	0	-	2	-			3		100	-	3	-	42,86	0,00	
3	Administrasi Keuangan			60	12.589.946.832	606	4.238.086.886	12	9.616.770.871	9.428.462.238	3	376.675.538	1006	1.175.688.583		945.823.188		676.123.837	12	9.276.477.964	999	98,36	418	7.123.868.686	606,57	42,16
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	60	17.044.766.712	606	4.238.086.886	12	9.617.770.871	9.428.462.238	3	976.675.538	3	1.175.688.583	3	945.823.188	2,00	676.123.837	12	9.276.477.964	100	61,34	418	7.123.868.686	606,57	42,16
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			60	293.798.080	12	60.000.150	12	60.000.000	96.271.300	3	6.886.697	3	6.886.700	3	11.686.388	13	17.681.608	6	96.897.797	10	95,34	18	96.897.697	30,60	33,63
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	60	60.000.000	12	6.886.697	12	6.886.697	1.000.000	3	126.100	3	1.175.688	3	1.175.688			12	1.961.000	100,00	91,11	24	6.886.697	40,00	42,62
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	60	11.000.000	12	12.791.000	12	11.000.000	6.811.000	3		3	1.175.688	3	6.900.000	12	6.776.000	100,00	99,87	24	12.175.000	40,00	40,14		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	60	60.000.000	12	7.796.100	12	7.980.000	4.130.000	3	900.000	3	1.175.688	3	940.000	12	4.148.000	100,00	99,03	24	11.940.100	40,00	36,13		
	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	60	10.000.000	12	11.580.000	12	11.000.000	11.880.000	3	198.000	3	940.000	3	9.950.000	3	6.670.000	12	10.150.100	100,00	99,87	24	12.120.100	40,00	36,14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	114.796.040	12	28.875.000	12	80.000.000	11.000.000	3	1.140.100	3	1.140.100	3	6.640.000	12	11.814.100	100,00	61,16	24	67.796.100	40,00	27,21		
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60	6.103.812.800	12	617.700.885	12	822.788.800	787.767.686	3	327.330.100	3	1.080.000.714	3	177.677.868	3	712.214.905	12	717.236.146	100	99,05	24	1.404.982.339	40,00	30,18

[illegible]

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2019 Rencana 2019		Target 2020		Realisasi per Triwulan % 2021										Berkas 2021		Desember 2021		Mekulaw 2021		Capaian 2021		Cat
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1				5	0	7	0	10	0	11	0	12	0	13	0	14	0	15	0	16	0	17	0	18	0	19
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	45	11.815.407	46	1.580.140	46	10.000.000	1.714.000	0	0	0	0	0	46	6.814.700	46	6.814.700	100,00	99,09	46	10.000.000	100,00	20,60	
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			120	184.088.407	40	10.801.600	40	20.000.000	17.100.000	40	200.000	-	100.000	0	6.761.000	0	6.817.000	60,00	18.504.000	100,00	94,31	80	18.504.000	66,67	34,59
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	120	184.088.407	40	10.801.600	40	20.000.000	17.100.000	40	200.000	0	100.000	0	6.761.000	0	6.817.000	60	18.504.000	100	94,31	80	18.504.000	66,67	34,59
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																			100,00		63,00		88,33	0		
Sangat Tinggi																					Rendah		Tinggi			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					10.488.842		21.091.700		10.480.000	10.391.070	0		621.000		10.491.850		5.311.000		20.230.000				10.391.000			
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100						
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	4,17		5,40		5,36		0,3		0,92		5,38		5,380		5,42		95,91						
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		15	10.488.842	0	21.091.700	0	10.480.000	10.391.070	0	0	1	828.000	1	10.093.850	1	3.301.000	5,00	20.230.000	0,00	13,76	10	10.238.100	66,67	31,68
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	15	10.488.842	0	21.091.700	0	10.480.000	10.391.070	0	0	1	828.000	1	10.093.850	1	3.301.000	5	20.230.000	100,00	13,76	10	10.238.100	66,67	31,68
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																			100,00				66,67			
Sangat Tinggi																							Sedang			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					10.488.842		21.091.700		10.000.000	10.000.000	0		0		0.207.200		12.911.000		17.888.000				10.000.000			
		Persentase pelayanan rumah anak di puskesmas	%	100		95,38		99,31		10,38		65,38		65,38		65		65,38		94,94						
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		120	10.488.842	40	21.091.700	40	10.000.000	10.000.000	40	10.000	0	0	0	0.207.200	0	12.911.000	60,00	17.888.000	100,00	94,94	80	10.000.000	66,67	76,92
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	120	10.488.842	40	21.091.700	40	10.000.000	10.000.000	40	10.000	0		0.207.200		12.911.000	60	17.888.000	100	94,94	80,00	10.000.000	66,67	76,92	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Triwulan 2020		Realisasi s.d/ Mei 2021		Target 2021		Realisasi per Triwulan 10 2021										Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s.d/ 2023		Capaian s.d/ 2023		Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Bulan	Triwulan	Bulan	Triwulan	Bulan	Triwulan	Bulan	Triwulan	Bulan	Triwulan	Bulan	Triwulan	Bulan	Triwulan	Bulan	Triwulan	Bulan	Triwulan	Bulan	Triwulan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																								1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																																		100,00						66,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Sangat Tinggi																																						Sedang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHIA)					01/01/2021		01/01/2021		01/01/2021		01/01/2021								01/01/2021		01/01/2021								01/01/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target/Hasil Rencana 2024		Realisasi s/d 2024		Target 2025		Realisasi per Triwulan 10, 2025								Realisasi 2025		Capaian 2025		Realisasi s/d 2025		Capaian s/d 2025		Ses.
				5	6	7	8	9	10	1		2		3		4		2025		2025		s/d 2025		s/d 2025		
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
5	2	4	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	59,2		58,80		58,7		58,5		58,6		58,5		60,1		60,10		100		54,10		100		
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	7,54		7,60		7,58		7,65		7,48		7,48		7,44		7,44		100		7,44		100		
		Median usia kawin pertama (MUKP)	%	20,5		19,80		19,9		19,8		19,8		19,8		22		22,00		100		22,00		100		
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	%	8,7		9,48		9,31		9,48		9,48		9,48		1,34		1,34		100		1,34		100		
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				60	2.495.193.298	12	413.532.213	12	96.000.000	96.000.000	9	24.132.733	3	4.000.000		109.476.319		100.000.000	6	947.330.576	25	90,09	18,00	989.803.129	30	34,53
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan	60	989.511.880	12	8	12	0	60.000.000	9	9.900.000	1	3.000.000	1	48.000.000	1	10001714	12	10.000.000	100	98,96	24,00	10.000.000	60	09,52	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	60	1.040.000.000	12	217.000.000	12		107.000.000	9		1	9	1	800.000	1	290.000.000	12	107.000.000	100	99,99	24,00	104.000.000	60	37,61	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	60	1.000.000.000	12	100.000.000	12		90.000.000	9	10.000.000	1	9	1	100.000.000	1	22.000.000	12	100.000.000	100	99,99	24,00	100.000.000	60	35,30	
				Buku atau Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																100,00				60,00		
				Sangat Tinggi																Sangat Rendah						
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				6.963.200.000		6.715.500.000		6.559.200.000		7.200.000.000		880.000.000		938.000.000		1.000.000.000		970.000.000		980.000.000		970.000.000		11.000.000.000		
	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	47,95	48,41		48,70		47,76		47,76		47,76		48,68		48,68		100								
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	80	77,9		77,7		83,10		82,21		82,21		82,54		82,54		100								
	Persentase KB pasca persalinan	%	70	69,31		69,8		66,79		66,70		66,70		62,09		62,09		96,75								
	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	10,68	7.976.000.000	14,89		15,11		10,17		15,57		15,57		15,57		15,57		100							
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					9.719.601.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	100.000.000		101.000.000		977.000.000		941.000.000	0	1.000.000.000	70,99	0,00	1.000.000.000		30,11			
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	60	9.876.900.000	12	1.000.000.000	12	770.000.000	1.000.000.000	9	100.000.000	1	101.000.000	1	970.000.000	1	941.000.000	12	961.000.000	100	99,79	24,00	1.000.000.000	60	20,39	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Mula Rencana 2019		Realisasi s/d 2020		Target 2020		Realisasi per Triwulan Th. 2020						Realisasi s/d 2020		Target 2020		Realisasi s/d 2020		Target 2020		Cat.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Rp)	I		II		III		K	Rp	K	Rp	K	Rp						
										1	Rp	2	Rp	3	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	16	91.700.000	1	25.300.000	12	17.800.000	21.800.000	9	790.000	3	8.070.000	3	11.000.000	3	91.071.000	12	91.101.000	100	90,14	12,00	90.907.000	33	72,41	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	18.360	5.981.900.000		1.409.576.700	6210	1.966.962.000	2.061.807.000	105	100.000.000	2150	101.907.000	2250	100.400.000	100	100.709.100	6.110	1.404.164.700	100	99,09	6.110,00	9.900.100.000	33	47,81	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	16	11.600.000		17.100.000	11	17.100.000	36.000.000	9	790.000	3		3	14.000.700	3,00	6.918.000,00	12	11.170.700	100	76,10	12,00	10.170.700	33	76,62	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KS					272	1.001.700.000	99	170.000.000	99	1.010.000.000	999.000.000	99		99		99.707.000		100.070.000	116	999.999.900	100	97	204	991.811.000	70	31	
	Fasilitas/pengelolaan dapur sehat atau stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas	Tertaksanannya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atau Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	dokumen	68	1.800.000	0	0	68	9.000.000	170.000.000	99	1	68	0	30.000.000		130.790.000	68	101.101.000	100	91,92	68,00	102.100.000	100	2.908,71		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung	204	1.011.500.000	99	170.000.000	99	1.007.000.000	170.000.000	99	0	99		30.742.000		91.800.000	68	110.101.100	100	91,99	68,00	999.107.000	33	22,83		
				Berkas dan Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																99,99					62,78		
				Sangat Tinggi																				Rendah			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.200.100.000		1.102.900.000		1.210.000.000		1.200.000.000		210.000.000		100.000.000		1.087.000.000		1.000.711.200		1.000.000.000				1.100.000.000			
	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga baik	%	46,00		45,10		45,10		46,27		49		49		50,23		50,23		100		100		100		100		--

No.	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Periode 2020		Realisasi s/d 2020		Target 2021		Realisasi s/d Triwulan IV, 2021										Realisasi 2021		Target 2022		Realisasi s/d 2022		Capaian s/d 2022		Cat.
				2020		2020		2021		I		II		III		IV		2021		2022		2022		2022				
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Indeks pengosuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,8	8	81,13	8	81,38	12	21	87,20	21	82	12	87	21	86,80	20	86,83	21	90,43	21	10 (11-20)	20 (20-25)	20 (20-25)	20 (20-25)	27 (20-25)	28
		Indeks lama berdaya	angka	58,4		51,83		51,46			51,63		58		58		95,90		95,90		100							
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		154	1.384.200.000	19	816.700.000	84	149.200.000	188.288.000	4	100.800	6	1.200.000	9	10.497.000	42	138.103.945	64	170.100.440	9	88	127	300.800.840	89	39		
		Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	keluarga	92	10.000.000	8		4	46	10.000.000	10.000.000	8		4	8		1.840.000	25	6.796.000	28	10.000.000	93,33	76,74	58,00	10.000.000	64	7,08	
		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	20.800.000	1	100.000	3	1.200.000	3	8.800.000	3	700.340	12	10.890.890	100	91,88	24,00	10.000.000	100	156,54		
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	laporan	12	81.000.000	8	17.500.000	12	80.000.000	20.998.000	4	4	3		0	3		20.680.000	12	41.000.000	100	90,32	18,00	10.000.000	100	117,228		
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	unit	40	1.380.000.000	38	800.000.000	18	130.000.000	130.000.000	9	4	0		0	0	12	120.076.890	12	100.076.890	100	96,31	17,00	100.076.890	93	30,36		
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1842	4.001.000.000	888	3.848.330.000	888	4.009.000.000	4.000.700.000	1808	370.889.000	1.829	517.200.000	1.832	1.476.001.000	1.831	1.746.629.289	7.320	4.800.180.180	94	94	9.168	7.487.088.480	897	191		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akta Nomor 2/2021		Realisasi U/L 2024		Tahun 2025		Realisasi per Triwulan IV 2025										Realisasi 2025		Capaian 2025		Realisasi U/L 2025		Capaian U/L 2025		KIR
				1	2	3	4	5	6	7	8	1		2		3		4		9	10	11	12					
												1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKS, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	organisasi	2	100.000.000	1	84.842.000	1	40.000.000	31.350.000					0,90	4.000.000	6,70	30.840.000	1	30.840.000	100	85,00	2,00	111.877.700	67	74,59		
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	%	100	1.007.000.000	100	1.007.000.000	1.007	1.007.000.000	1.007.000.000	1.007	96.889.000	1.827	96.283.000	1.827	997.000.000	1.827	998.889.000	100	99,08	1.827,00	9.884.109.000	100	100,00	100	100,00		
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	%	12	1.008.900.000	12	8.930.100.000	12	1.008.900.000	1.008.900.000	1	100.000.000	2	100.000.000	2	998.900.000	3	998.900.000	11	1.000.000.000	91,67	99,96	23,00	9.884.109.000	100	100,00		
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																			97,88					99,08				
Sangat Tinggi																			Tinggi									
KABUPATEN				10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000			
KATA KATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																			92,22	91,07								
PRODUK																			Tinggi									
KATA KATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																			90,00									
PRODUK																			Tinggi									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan : perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam lima : untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																												

Disusun :
 Temanggung, Januari 2026
 KEPALA DPPPAPKB
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197007301990012002

Dievaluasi :
 Temanggung, Januari 2026
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SOMARYANA, M.T.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197203241992061003

LAPORAN TINDAK LANJUT DARI LHE AKIP 2025

DPPPAPPKB

NO	REKOMENDASI ATAS LHE SAKIP TAHUN 2023	TINDAK LANJUT
1	Rumusan tujuan dan sasaran telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, namun rumusan sasaran dan IKU dalam dokumen renstra tidak selaras pada antar bab dalam renstra	Akan ditindak lanjuti pada penyusunan dokumen renstra di periode selanjutnya (Upload dokumen renstra 2025–2029)
2	Terdapat ketidakselarasan IKU pada dokumen perencanaan, yaitu: a. Rumusan Sasaran pada dokumen PK berbeda dengan Renstra dan Renja b. IKU dalam renstra berbeda dengan renja dan PK	Dituangkan dalam Perubahan PK tahun 2025 (Upload PK perubahan tahun 2025)
3	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional/nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Akan dituangkan pada penyusunan dokumen LKJiP Tahun 2025

TEMANGGUNG, JUNI 2025
KEPALA DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM
NIP. 197007301990012002

Pertemuan Perdana Sekolah Lansia Dharma Samahita

Selasa, 14/01/2025



Selasa, 14 Januari 2025, di gedung pertemuan Dusun Kedungombo, Desa Guntur Kecamatan Temanggung, telah dilaksanakan pertemuan perdana Sekolah Lansia Dharma Samahita. Sekolah Lansia yang beranggotakan 27 lansia tersebut, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung, Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM. Dalam sambutan Kepala Desa Guntur disampaikan bahwa melihat antusiasisme para lansia dalam kegiatan sosial, maka dibentuklah sekolah lansia yg diawali dari Dusun Kedungombo dan kegiatannya memanfaatkan gedung pertemuan RW. Kegiatan Sekolah lansia ini dibiayai dengan APBDes tahun 2025. Sementara itu Koordinator Penyuluh KB Kec.Temanggung, Arie Agung Martanto, S.Ikom menyampaikan bahwa seklaan Dharma Samahita yang mempunyai arti Lansia yang pintar dan bijaksana, dikelola oleh kader kader di Desa Guntur. Sekolah Lansia ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia.

Ibu Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM memberi apresiasi kepada Pemerintah Desa Guntur yg mempunyai inisiatif membentuk Sekolah Lansia dengan anggaran dari APBDes. Di samping itu beliau menekankan bahwa tujuan dari Sekolah Lansia adalah untuk membuat lansia bahagia, sehat, mandiri, aktif. Ibu Gema juga berharap Sekolah Lansia Dharma Samahita ini nanti bisa melaksanakan gerakan kembali ke meja makan. Gerakan ini dimaksudkan agar perhatian dan komunikasi antar anggota keluarga bisa lebih baik. Kegiatan Sekolah Lansia yg rencananya akan dilaksanakan 8 kali pertemuan dalam tahun 2025 ini, diawali dengan penyampaian materi dimensi spiritual yang disampaikan oleh narasumber dari Kemenag.

Sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas Serta Revitalisasi Kampung Keluarga Berkualitas yang Terintegrasi dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kecamatan Wonobojo

Rabu, 19/02/2025



Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas, serta revitalisasi Kampung Keluarga Berkualitas yang terintegrasi dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kecamatan Wonobojo. Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber Kepala DPPPAPKB Kabupaten Temanggung, Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM.

Peserta kegiatan ini adalah Sekretaris Desa, Kaur Umum, serta Petugas Sistem Informasi Desa dari semua desa yang ada di Kecamatan Wonobojo. Kegiatan dilaksanakan guna mendorong terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas dan revitalisasi Kampung Keluarga Berkualitas di 3 desa yang sudah menjadi kampung Keluarga Berkualitas, yaitu Desa Tening, Desa Wonobojo dan Desa Pitrosari yang terintegrasi dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Disampaikan oleh Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM bahwa Kampung Keluarga Berkualitas adalah wilayah setingkat desa yang mengintegrasikan seluruh dimensi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbasis Keluarga. Sedangkan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan desa.

Disampaikan juga bahwa tujuan KKB (Kampung keluarga Berkualitas) adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam mengelola lingkungan.
3. Meningkatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
4. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya.

Diharapkan dengan KKB dan DRPPA, desa mempunyai rumah data sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan desa serta diharapkan masyarakat dapat melakukan perubahan perilaku menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Bhakti Sosial Pelayanan KB khususnya
KB MKJP IUD dan Implant di Puskesmas Kedu
Rabu, 26/02/2025**



Dalam rangka Harlah Muslimat NU ke 79, pada hari ini Rabu 26 Februari 2025 telah dilaksanakan Bhakti Sosial Pelayanan KB khususnya KB MKJP IUD dan Implant di Puskesmas Kedu.

Hadir secara pribadi Plh. Bupati Temanggung ibu drg. Nadia Muna, Kepala Dinas PPPAPKB Ibu Dra.Gema Artisti Wahyudi, MM, Kepala Dinas Kesehatan Ibu dr. Intan Pandanwangi, MM, Camat Kedu Bapak Subchan S.Sos, MM, Kepala Puskesmas Kedu dr. Arif Kurniawan, Danramil Kedu, Kapolsek Kedu, Pengurus TP PKK Kabupaten, Ketua TP PKK Kecamatan Kedu, Pengurus PC Muslimat NU Kabupaten Temanggung, serta Ketua PAC Muslimat Kecamatan se Kabupaten Temanggung.

Dalam pembukaan acara Bhakti Sosial Pelayanan KB disampaikan sambutan dari Ketua YKMNU, Sambutan Ketua PC Muslimat, Sambutan Kepala Dinas PPPAPKB, serta Sambutan pengarahannya Plh Bupati Temanggung. Dalam sambutannya drg. Nadia Myda, memberikan apresiasi atas kegiatan sosial yang dilaksanakan Muslimat NU, dan atas kontribusinya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan pembangunan manusia melalui Pelayanan KB MKJP dan Non MKJP, yang dilaksanakan diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan pada semua Kecamatan se Kabupaten Temanggung yang dimulai tanggal 4 sampai dengan 28 Februari 2025.

Diharapkan dengan sinergitas antara Dinas PPPAPKB dengan organisasi masyarakat Muslimat NU dapat mengatasi beberapa isu strategis program Bangga Kencana diantaranya menurunkan penggunaan kontrasepsi modern, kebutuhan ber KB yang tidak terlayani, dan tingginya peserta KB putus pakai (DO).

**Pelayanan KB IUD dan Implant di
PT Dharma Satya Nusantara (DSN)
Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan
Kamis, 08/05/2025**



Dalam rangka perluasan akses dan pendekatan pelayanan KB serta Hari Buruh Internasional pada hari ini Kamis 8 Mei 2025 telah dilaksanakan pelayanan KB IUD dan Implant di PT Dharma Satya Nusantara (DSN) Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan yang dilayani tenaga kesehatan dari Puskesmas Kranggan. Kegiatan Pelayanan KB ditahap 1 ini telah dilayani sebanyak 17 orang dari 21 orang yang mendaftar dengan perincian akseptor IUD : 11 orang dan akseptor Implant : 6 orang, 4 orang gagal dilayani karena hipertensi dan gangguan kesehatan lainnya. Pelayanan tahap 2 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 15 Mei. Selain di PT DSN pelayanan KB MKJP juga akan diadakan di PT Shoenary Javanesia Inc (SJI) yang berlokasi di desa Bengkal Kecamatan Kranggan tanggal 23 Mei 2025.

Diharapkan dengan adanya pendekatan pelayanan KB ditempat kerja para karyawan dan istri karyawan perusahaan mendapatkan pelayanan KB dilingkungan tempat kerjanya sendiri sehingga tidak perlu ijin atau cuti meninggalkan pekerjaan di perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan juga mendapatkan benefit yaitu karyawan semakin produktif dalam bekerja dan mengurangi prosentase cuti melahirkan.

**Sosialisasi Bangga Kencana kepada Kader
Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 23 orang
dari Kecamatan Wonoboyo dan Kecamatan Tretep
Selasa, 03/06/2025**



Selasa, 3 Juni 2025 bertempat di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Wonoboyo dilaksanakan Sosialisasi Bangga Kencana kepada Kader Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 23 orang dari Kecamatan Wonoboyo dan Kecamatan Tretep. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Roro Rita, S Sos. MM., Plt. Kepala Bidang PPPA Dinas PPPAPKB Kab. Temanggung, acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi dari kader PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di tingkat desa dan meningkatkan kemampuan untuk kader PPA dalam menampung laporan klien serta mendampingi klien dengan tepat sehingga klien bisa mendapat pelayanan pendampingan dengan baik. Materi pertama disampaikan oleh Januar Imam Nugraha, SH Analis Hukum bidang PPPA dan untuk materi kedua disampaikan oleh Kartika Hikma Dayanti, S.Psi tentang penanganan korban kekerasan.

Pelayanan KB baik KB MKJP,KBPP dan KB Non MKJP yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 31 Mei 2025 di semua Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) se Kabupaten Temanggung
Kamis, 05/06/2025



Dalam rangka peningkatan pencapaian KB khususnya KB MKJP dan KBPP serta dalam rangka Bulan Bhakti IBI tahun 2025 telah dilaksanakan Pelayanan KB baik KB MKJP,KBPP dan KB Non MKJP yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 31 Mei 2025 di semua Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) se Kabupaten Temanggung.Dalam rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan hampir 1 bulan penuh ini telah dilayani 3371 akseptor atau 125,54% target yang ditetapkan Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah sebesar 2685 akseptor dengan perincian per mix kontrasepsinya IUD : 282 akseptor, Implant : 927 akseptor, MOW : 38 akseptor, Suntik : 944 akseptor,Pil : 700 akseptor dan Kondom : 480 akseptor,se sedangkan untuk pelayanan KBPP masih dibawah target hanya tercapai 400 akseptor dari target 1225 akseptor.

Diharapkan dengan adanya kegiatan pelayanan KB dalam momentum-momentum strategis ini semakin ditingkatkan dalam Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat utamanya ibu-ibu pasca persalinan untuk mengikuti KB Pasca Persalinan sehingga percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung segera tercapai.

**Sosialisasi Program Bangga Kencana kepada Kader Perlindungan
Perempuan dan Anak (Kader PPA) Kecamatan Kranggan dan Kecamatan
Pringsurat**

Rabu, 18/06/2025



Rabu, 18 Juni 2025 bertempat di Balai KB Kecamatan Kranggan telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana kepada Kader Perlindungan Perempuan dan Anak (Kader PPA) Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat. Kegiatan hari ini dihadiri oleh 27 kader yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pada hari ini.

Hadir Plt. Kepala Bidang PPPA DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung beserta jajarannya sebagai narasumber. Kegiatan pada hari ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan pengetahuan para kader dalam deteksi dini dan strategi penanganan aduan kasus kekerasan yang terjadi nantinya. Diharapkan dengan terselenggarakannya acara ini dapat menjadi bekal bagi para kader dalam bertugas dan terjun langsung di masyarakat.

**Rembug Stunting Tahun 2025 yang bertempat di Graha Bumi Phala,
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Rabu, 02/07/2025**



Pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Temanggung menyelenggarakan kegiatan Rembug Stunting Tahun 2025 yang bertempat di Graha Bumi Phala, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Temanggung. Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Ketua Komisi A dan Komisi D DPRD, Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung, organisasi perangkat daerah terkait, para camat, kepala puskesmas, ketua TPPS desa, organisasi wanita, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan perbankan.

Acara diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Ibu Idza Fatriah Izzudin Don, SH, MM selaku Plh. Sekdin DPPPAPPKB. Dilanjutkan sambutan oleh Bapak Yunianto, SP selaku Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, dan pembukaan secara resmi oleh Bapak Djoko Prasetyono, S.Sos, MM selaku Kepala Kesbangpol yang mewakili Bupati Temanggung.

Setelah pembukaan, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting oleh perwakilan peserta. Materi disampaikan oleh:

1. Bapak Hendra Sumaryana, ST, M.Sos selaku Kepala Bappeda yang memaparkan analisis situasi stunting dan pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2025
2. Ibu dr. Intan Pandanwangi B., MM dari Dinas Kesehatan yang menyampaikan evaluasi kegiatan tahun 2024 dan rencana kegiatan tahun 2025
3. Ibu Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM selaku Kepala DPPPAPPKB yang menyampaikan evaluasi kegiatan tahun 2024 dan rencana tahun 2025, serta penguatan program Quick Win Kemendukbangga.

Sesi diskusi berlangsung aktif dan dinamis. Beberapa peserta menyampaikan bahwa masih ada kebingungan di lapangan mengenai perbedaan antara anak stunting

dan keluarga risiko stunting. Selain itu, perwakilan Forum Kadang Temanggung menyampaikan pertanyaan terkait peran mereka dalam mendukung penurunan stunting, khususnya melalui penyediaan jamban sehat dan akses air bersih bagi masyarakat.

Moderator acara, Ibu Dian Probowati, SKM., M.Kes. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, memandu sesi diskusi sekaligus menyampaikan penekanan atau stressing dari Sekretaris Daerah sebagai penutup kegiatan. Dalam penekanan tersebut disampaikan bahwa:

"Stunting adalah ancaman serius bagi masa depan anak-anak Temanggung. Jika kita tidak bertindak hari ini, maka kita sedang membiarkan masa depan itu terenggut perlahan. Tahun 2025 adalah momentum untuk bergerak lebih cepat dan lebih kuat. Kita sudah memiliki data, program, dan anggaran. Tinggal memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Mari kita kuatkan komitmen dan aksi nyata dari tingkat kabupaten hingga rumah tangga. Karena satu anak bebas stunting hari ini adalah satu investasi besar untuk Temanggung yang lebih sejahtera di masa depan."